

**PERAN PERUM BULOG KANTOR WILAYAH ACEH DALAM  
MENJAGA STABILITAS HARGA BERAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**Alia Nabilla**

**NIM. 190802023**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alia Nabilla  
NIM : 190802023  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar 02 Februari 2000  
Alamat : Desa Dham Pulo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,



**ALIA NABILLA**  
NIM. 190802023

**PERAN PERUM BULOG KANTOR WILAYAH ACEH DALAM  
MENJAGA STABILITAS HARGA BERAS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Alia Nabilla

NIM. 190802023

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Administrasi Negara**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muji Mulia, M. Ag  
NIP. 197403271999031005

Pembimbing II,



Arif Akbar, MA  
NIP. 199110242022031001

**PERAN PERUM BULOG KANTOR WILAYAH ACEH DALAM  
MENJAGA STABILITAS HARGA BERAS**

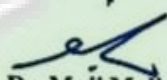
**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

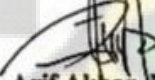
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Juli 2023  
25 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

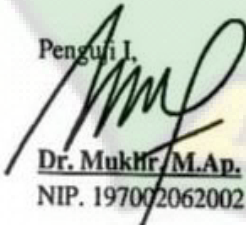
Ketua,

  
Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP.197403271999031005

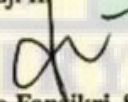
Sekretaris,

  
Arif Akbar, M.A.  
NIP. 199110242022031001

Penguji I,

  
Dr. Mukhr, M.Ap.  
NIP. 197002062002121002


Penguji II

  
Mirza Fanzikri, S.Sos.L, M. Si  
NIP. 199007022020121010

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Dalam menjamin ketersediaan dan kestabilan harga beras maka didirikan Perum Bulog sebagai perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik. Untuk melaksanakan tugasnya maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Ketidakstabilan harga sangat perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi produsen dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dalam menjaga stabilitas harga beras serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjaga stabilitas harga beras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh dalam menjaga stabilitas harga beras itu hanya sebagai operator atau pelaksana kebijakan sedangkan yang berfungsi sebagai regulator atau pembuat kebijakan adalah Badan Pangan Nasional. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bulog antara lain Operasi Pasar atau SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), penetapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah), impor beras, dan Satgas pangan. Adapun faktor pendukung dalam menjaga stabilitas harga beras adalah telah dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas), meninjau harga beras di pasar, melakukan pemerataan stok cadangan beras, melakukan operasi SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan), dan melakukan penyerapan beras di kilang-kilang padi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya permainan pedagang beras di pasar, laju inflasi yang tinggi, faktor bencana alam seperti gagal panen, banjir.

Kata Kunci : *Peran, Perum Bulog, Stabilitas Harga*

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul **“Peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras”**. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Tujuan penulisan proposal skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penyelesaian proposal skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak lain. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry beserta para staf dan jajarannya yang telah membantu peneliti untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Dr. Muji Mulia, M. Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan segenap waktu dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Arif Akbar, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak motivasi serta arahan maupun bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah yang telah menyediakan bahan dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Fitri Aisyah, S.Pd yang senantiasa memberi doa yang tulus, motivasi, dan kasih sayang.
8. Seluruh kawan-kawan seperjuangan angkatan 2019 Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan saran-saran bantuan moral dan motivasi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Namun kesempurnaan hanya milik Allah, jika terdapat kesalahan peneliti meminta maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat terutama untuk peneliti sendiri dan lainnya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 18 Januari 2023  
Penulis,

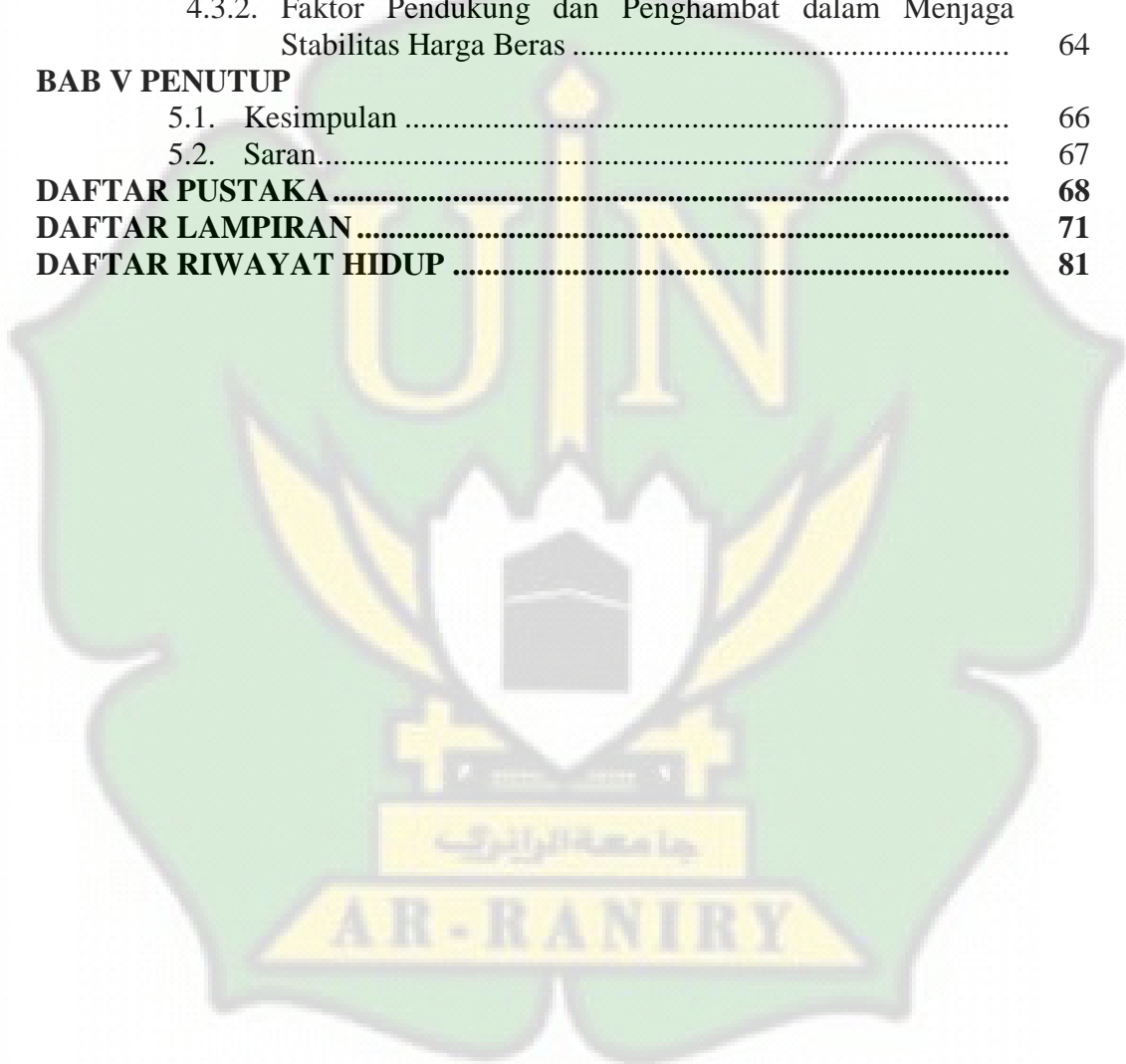
Alia Nabilla

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Teori Peran.....	8
2.1.1 Pengertian Peran.....	8
2.1.2 Peran Perum Bulog.....	10
2.2 Kebijakan Publik.....	11
2.2.1 Kebijakan Perberasan .....	11
2.2.2 Kebijakan Stabilisasi Harga Beras .....	12
2.2.3 Kebijakan Ketahanan Pangan.....	15
2.2.4 Kebijakan Harga.....	16
2.3 Penelitian yang Relevan.....	18
2.4 Kerangka Berpikir.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	22
3.2. Fokus Penelitian .....	22
3.3. Lokasi Penelitian.....	23
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	23
3.5. Informan Penelitian.....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	27
3.8. Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	31
4.1.1. Sejarah Perum Bulog.....	31
4.1.2. Lokasi Penelitian .....	35
4.1.3. Makna Logo Perusahaan .....	35
4.1.4. Visi, Misi, Tata Nilai dan Budaya Perusahaan.....	36
4.1.5. Kepemilikan Saham .....	38
4.1.6. Perencanaan dan Pengembangan Usaha.....	38
4.1.7. Struktur Organisasi.....	40
4.1.8. Daftar Karyawan .....	41



4.2. Hasil Penelitian .....	43
4.2.1 Peran Perum Bulog Kanwil Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras .....	43
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras .....	58
4.3. Pembahasan.....	61
4.3.1. Peran Perum Bulog Kanwil Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras .....	61
4.3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	66
5.2. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Harga Pangan Beras .....	5
Tabel 3.1. Peran Perum Bulog Kanwil Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras .....	22
Tabel 3.2. Informan Penelitian .....	25
Tabel 4.1. Makna Logo Perusahaan Bulog .....	35
Tabel 4.2. Daftar Nama Karyawan Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh .....	41
Tabel 4.3. Daftar Harga Bahan Pokok Operasi Pasar Murah Juni 2023 .....	45



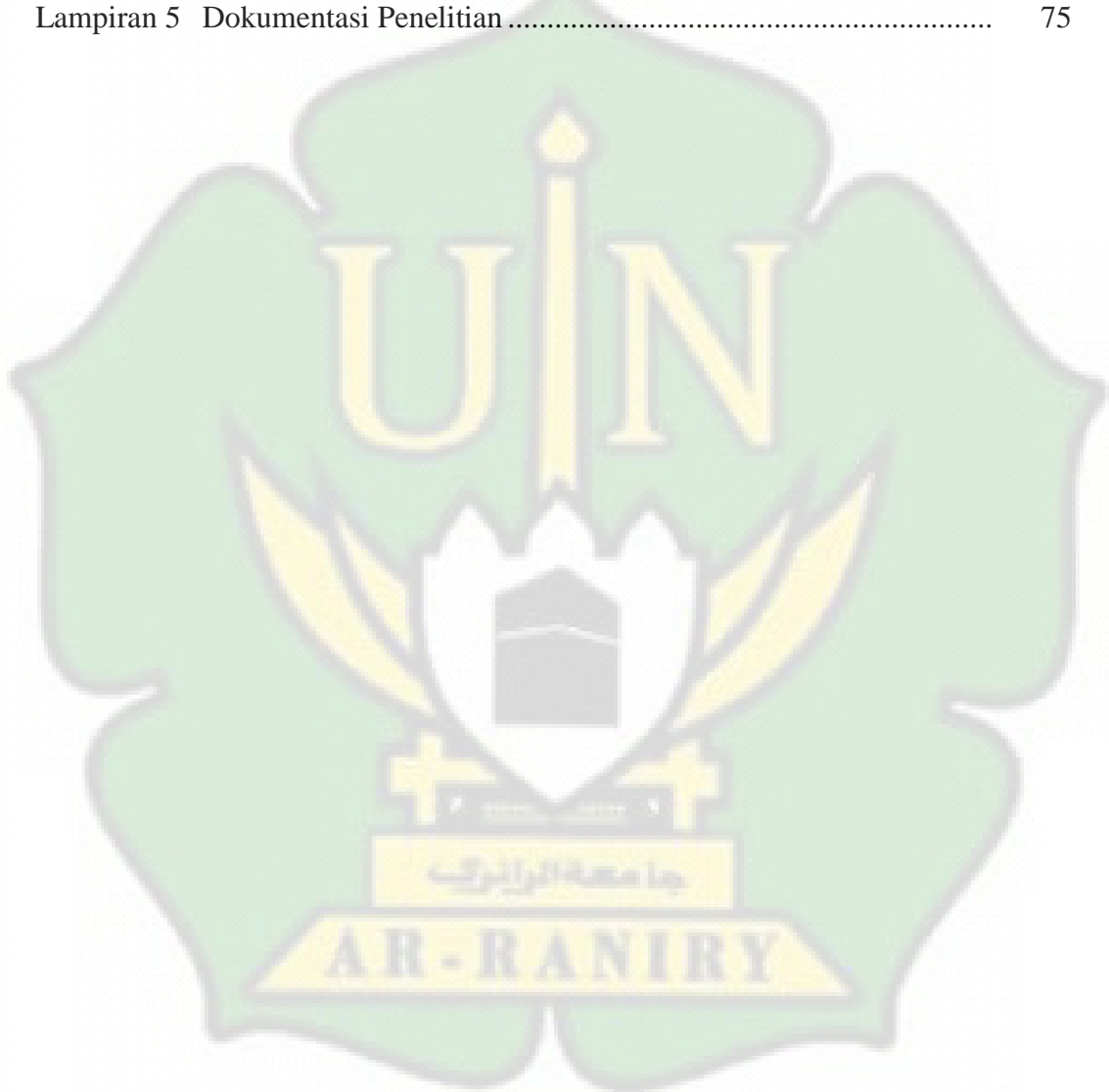
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Kenaikan dan Penurunan Harga Beras.....	6
Gambar 2.1.	Kerangka Berpikir .....	21
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Perum Bulog Kanwil Aceh .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fisip .....	71
Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah.....	72
Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian.....	73
Lampiran 4 Realisasi Pengadaan Beras dari Kilang Padi .....	74
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian .....	75



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara agraris yang subur serta memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang kaya dan berkualitas. Dalam menjamin kesejahteraan suatu negara maka hal yang paling penting dilakukan yaitu stabilisasi pangan. Stabilisasi pangan merupakan suatu kondisi dimana telah terpenuhinya pangan suatu negara sampai perseorangan baik dari jumlah, mutu, keamanan, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Dari berbagai jenis pangan (pokok), beras merupakan salah satu jenis pangan yang strategis di Indonesia.

Beras merupakan komoditi yang penting bagi masyarakat Indonesia baik sebagai makanan pokok maupun sebagai komoditi strategis. Sebagai makanan pokok, beras yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia karena beras mempunyai karbohidrat yang tinggi dengan kandungan gizi perberas 100 gr yaitu 60kkal energy, 6,6 gr protein, 0,58 gr lemak, dan 79,34 gr karbohidrat, sedangkan sebagai komoditi strategis, fluktuasi harga yang terlalu tinggi sehingga dapat memberatkan masyarakat dan sekaligus merugikan petani. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan impor beras murah, tingginya jumlah impor berdampak

bagi petani di Indonesia terutama dalam persaingan harga dengan beras impor murah.<sup>1</sup>

Dalam menjamin ketersediaan dan kestabilan harga beras, pada tahun 1967 Negara telah membentuk Perum Bulog sebagai perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang tugas Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional adalah pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan, pelaksanaan impor pangan, pengembangan industri berbasis pangan, dan pengembangan pergudangan pangan.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan oleh pemerintah kepada Perum Bulog, maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Dalam intruksi ini memuat bahwa Presiden RI memberikan amanat kepada Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan melalui pembelian beras oleh pemerintah melalui Perum Bulog, pengadaan beras berasal dari hasil produksi petani dalam negeri dan menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.

Adapun pengadaan beras dalam negeri berawal dari produksi petani. Dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP), petani menjadi aman dalam

---

<sup>1</sup> Anggun Juwita Tangkudung, *Analisis Penerapan dan Manajemen Strategi Distribusi Beras di Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo)*, Jurnal Ilmiah Agribisnis, Vol. 1, No.1, Tahun 2016, h. 2 (Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 13:40 WIB)

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

melaksanakan usaha tani padinya. Pengadaan dalam negeri menjadi jaminan harga dan sekaligus jaminan pasar atas hasil produksinya. Dengan semangat berproduksinya, produksi padi akan meningkat dan ketersediaan pangan (beras) dalam negeri akan mencukupi. Salah satu pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan (*availability*) dapat tercapai.

Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga dan beras, salah satu instrumen kebijakan harga yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditujukan untuk melindungi petani sebagai produsen dari jatuhnya harga gabah saat panen raya, sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen terutama dari lonjakan harga saat musim paceklik. Konsep harga dasar selanjutnya disesuaikan menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) per 1 Januari 2022 dan kemudian menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada tahun 2005. Konsep harga maksimum kemudian dituangkan dalam kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Esensi dari penerapan HPP adalah untuk memberikan insentif bagi petani padi dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan, terutama pada saat panen raya. Melalui kebijakan HPP pemerintah mengharapkan produksi padi dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri, terciptanya stabilitas harga gabah dan beras di pasaran, serta meningkatkan pendapatan petani padi. Kebijakan penetapan HPP gabah yang dilakukan selama

ini berdasarkan kadar air dan kadar hampa, sedangkan HPP beras adalah kadar air dan butir patah beras.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh, peneliti melihat bahwa Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh terus saja memastikan fungsi stabilisasi harga pangan khususnya beras. Pada tahun 2023 tepatnya awal januari untuk meredam gejolak kenaikan harga beras di pasaran dengan menggelontorkan sebanyak 1.533 ton beras dalam operasi pasar.<sup>3</sup> Tidak hanya itu, Perum Bulog Divisi Regional Aceh juga telah mengimpor beras dari Thailand sebanyak 13.500 ton tepatnya pada bulan februari 2023 sehingga stok beras yang tersedia bertambah menjadi 20.000 ton beras dengan kualitas premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan ramadan dan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Terlebih Aceh akan menghadapi puncak musim panen di bulan maret dan Bulog akan menyerap sebanyak mungkin beras dari petani guna memenuhi kebutuhan beras pada bulan-bulan berikutnya.<sup>4</sup> Harapannya semua stok cadangan beras pemerintah tahun ini bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri sendiri. Bulog aceh juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait stabilisasi harga beras agar tidak terjadi lonjakan harga beras yang tinggi.

Kestabilan harga sangat perlu diperhatikan karna sangat mempengaruhi produsen khususnya petani dan konsumen. Ketidakstabilan harga beras bagi produsen akan mempengaruhi gairahnya dalam memproduksi sehingga tidak dapat

---

<sup>3</sup> <https://acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/redam-kenaikan-harga-beras-bulog-aceh-lepas1533-ton-beras-operasi-pasar>

<sup>4</sup> <https://dialeksis.com/aceh/stok-mencapai-20000-ton-bulog-aceh-jamin-persediaan-beras-aman-hingga-lebaran/>



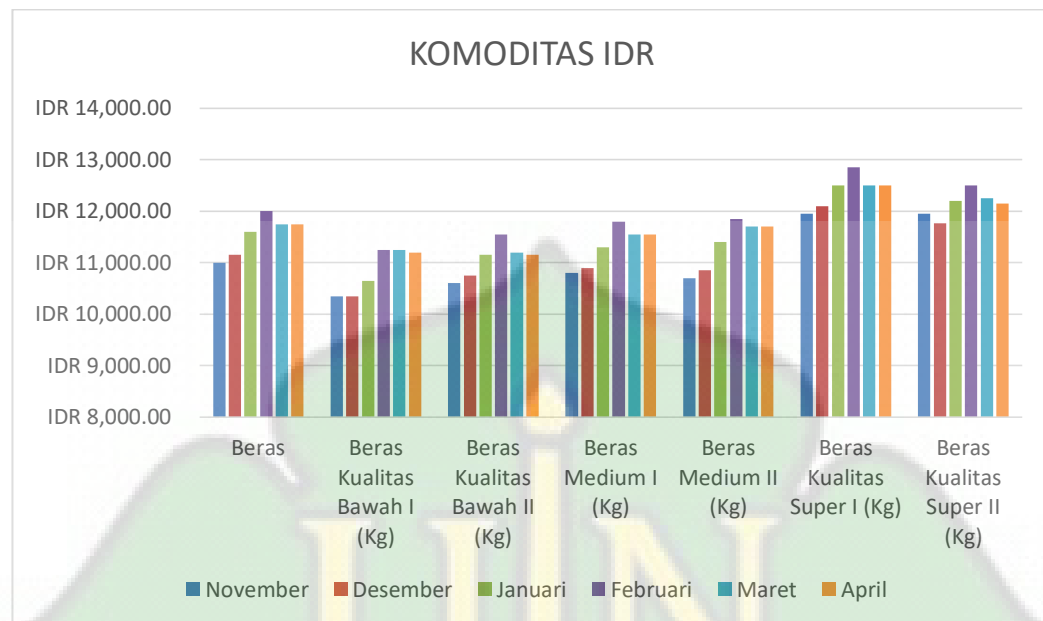
memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik. Jika harga berfluktuasi terlalu tajam dikhawatirkan gairah petani untuk menanam padi akan menurun, jika hal itu terjadi dalam skala besar produksi padi dan ketahanan pangan akan terancam dan ini berarti konsumen akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, hal ini dikarenakan produksi beras dalam negeri yang tidak mencukupi.

Berikut ini adalah perkembangan harga pangan beras November 2022 sampai April 2023.

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Harga Pangan Beras November 2022-April 2023<sup>5</sup>**

<b>Komoditas (Rp)</b>	<b>November</b>	<b>Desember</b>	<b>Januari</b>	<b>Februari</b>	<b>Maret</b>	<b>April</b>
Beras	Rp. 11.000	Rp.11.150	Rp.11.600	Rp.12.000	Rp.11.750	Rp.11.750
Beras Kualitas Bawah I (Kg)	Rp.10.350	Rp.10.350	Rp.10.650	Rp.11.250	Rp.11.250	Rp.11.200
Beras Kualitas Bawah II (Kg)	Rp.10.600	Rp.10.750	Rp.11.150	Rp.11.550	Rp.11.200	Rp.11.150
Beras Medium I (Kg)	Rp.10.800	Rp.10.900	Rp.11.300	Rp.11.800	Rp.11.550	Rp.11.550
Beras Medium II (Kg)	Rp.10.700	Rp.10.850	Rp.11.400	Rp.11.850	Rp.11.700	Rp.11.700
Beras Kualitas Super I (Kg)	Rp.11.950	Rp.12.100	Rp.12.500	Rp.12.850	Rp.12.500	Rp.12.500
Beras Kualitas Super II (Kg)	Rp.11.500	Rp.11.750	Rp.12.200	Rp.12.500	Rp.12.250	Rp.12.150

<sup>5</sup> <https://hargapangan.id/tabel-harga/pasar-tradisional/komoditas>



**Gambar 1.1. Grafik Kenaikan dan Penurunan Harga Beras**

Berdasarkan fenomena yang ada di atas mengenai pentingnya menjaga stabilitas harga beras untuk mencapai ketahanan pangan nasional khususnya di Aceh. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang **“Peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras.”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

1. Melihat peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dalam menjaga stabilitas harga beras.
2. Melihat faktor pendukung dan penghambat dalam menjaga stabilitas harga beras .

### **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dalam menjaga stabilitas harga beras?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menjaga stabilitas harga beras di Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dalam menjaga stabilitas harga beras.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjaga stabilitas harga beras Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dalam menjaga stabilitas harga beras.

#### **2. Kegunaan Praktik**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar maupun pedoman dalam pengambilan keputusan mengenai masalah yang timbul serta dapat menjadi masukan mengenai kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga sehingga tercapainya target perusahaan selama ini yang sekaligus berguna meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Peran**

###### **1. Pengertian Peran**

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki posisi dalam struktur sosial tertentu. dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karna posisi yang didudukinya tersebut, artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya.<sup>7</sup> Tidak hanya itu, konsep tentang peran menurut Komarudin dalam buku *Ensiklopedia Manajemen* mengungkapkan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Soekanto Sarjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 268.

<sup>7</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 7.

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian utama fungsi seseorang dalam kelompok atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
- d. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.<sup>8</sup>

Menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa mengungkapkan bahwa dalam peran terdapat beberapa dimensi mengenai peran, diantaranya yaitu:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi, penganut peran ini merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dan proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.
- d. Peran sebagai alat menyesuaikan sengketa, suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dan pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini

---

<sup>8</sup> Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 768.

adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka dan bukan komponen penting dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran adalah sebuah tindakan atau perilaku seseorang dalam masyarakat yang menduduki posisi tertentu di sebuah organisasi atau masyarakat dalam status sosial. Peran juga bisa diartikan sebagai pembagian kedudukan kepada pemegang jabatan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan posisinya.

## **2. Peran Perum Bulog**

Perum Bulog adalah perusahaan BUMN dan telah ditunjuk oleh pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja Perum Bulog, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Pasal 3(2) dari peraturan tersebut menugaskan Perum Bulog untuk menstabilkan harga beras di tingkat petani dan konsumen; untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP); untuk melaksanakan pengadaan beras, distribusi beras, dan impor beras; dan untuk mengembangkan industri berbasis beras serta mengelola gudang-gudang beras. Selain menstabilkan

---

<sup>9</sup> Horoepoetri, dkk, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), h.23.

harga pangan, Pasal 9 dalam peraturan yang sama juga menugaskan Perum Bulog untuk mengalokasikan CBP untuk hal-hal yang signifikan dan penting, misalnya bencana alam dan bencana nasional serta situasi darurat lainnya.<sup>10</sup>

Tugas dan peran bulog yang diberikan kepada Bulog merupakan implementasi kebijakan harga seperti yang dikatakan Affif dan Mearstahun antara lain:<sup>11</sup>

- a. Menyangga harga dasar yang cukup tinggi untuk merangsang produksi
- b. Perlindungan harga maksimum yang menjamin harga yang layak bagi konsumen
- c. Perbedaan harga yang layak antara harga dasar dengan harga maksimum agar merangsang perdagangan
- d. Hubungan harga yang wajar antara harga domestik dengan harga internasional

## 2.2.2 Kebijakan Publik

### 1. Kebijakan Perberasan

Berdasarkan regulasi konstitusi yang tertuang dalam Inpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan. Kebijakan perberasan merupakan paket kebijakan yang terdiri dari 5 instrumen. Diantaranya adalah instrumen peningkatan produksi, diversifikasi, kebijakan harga, kebijakan impor, dan distribusi beras untuk keluarga miskin (Raskin). Kebijakan tersebut dibuat

---

<sup>10</sup> Galuh Octania, *Peran Pemerintah Rantai Pasok Beras Indonesia*, (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, 2021), h. 21.

<sup>11</sup> Sabaruddin Amrullah, *Kebijakan Ekonomi Beras Indonesia*, (Jakarta: Puslit-bang Bulog, 2013), h. 12.

guna melindungi petani dan konsumen dari dampak negatif perdagangan internasional. Pada hakekatnya terdapat tiga aspek yang saling berkaitan dalam kebijakan pangan dan gizi yaitu aspek produksi, distribusi, dan konsumsi.

Kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah merupakan intervensi yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas harga dan ketersediaan beras. perubahan ketersediaan (kuantitas) beras akan berdampak terhadap perubahan harga beras. Perubahan harga berdampak terhadap harga non beras dan mempengaruhi daya beli masyarakat secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran pendapatannya dimana penduduk miskin menghabiskan hampir 24 persen untuk membeli beras sedangkan yang non miskin hanyalah sebesar 9,4 persen untuk beras. Sehingga jika Indonesia mampu mengendalikan ketersediaan beras akan berdampak pada kestabilan harga beras dan mendorong kestabilan harga non beras sehingga laju inflasi bisa dikendalikan.<sup>12</sup>

## **2. Kebijakan Stabilitas Harga Beras**

Menurut Kementerian Perdagangan (2015) dikatakan bahwa stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama antara produsen dan konsumen. Kepentingan produsen adalah menginginkan adanya kepastian usaha karena harga yang stabil dapat meningkatkan perencanaan produksi dan tentu saja adalah output yang lebih baik. sedangkan dari konsumen, instabilitas harga

---

<sup>12</sup> Dudi Septiadi, dkk, *Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 13. No.2, Tahun 2019, h. 89 (Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2023 Pukul 08.10 WIB)



pangan berpotensi mengganggu program ketahanan pangan (ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan gizi pangan).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor instrumen kebijakan stabilisasi harga yang berpengaruh signifikan terhadap harga beras konsumen yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras, operasi pasar dan impor beras.

Kebijakan harga dasar gabah beras pertama kali dimuat dalam Inpres Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pembelian Beras dalam negeri untuk tahun 1973/1974. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi petani ketika musim panen tiba, selain itu juga ditetapkan kebijakan harga atap atau harga eceran tertinggi untuk memberikan perlindungan pada konsumen terutama pada saat musim paceklik. Dalam perkembangannya kebijakan harga dasar dan harga atap ini dihilangkan dan berganti dengan Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) yang selanjutnya menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Selanjutnya, upaya juga dilakukan melalui kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah yang diatur dalam beberapa Inpres dan Permen, salah satunya tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Kebijakan ini diatur dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan pemerintah. Pengadaan beras melalui impor dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi stok dan CBP dan menjaga stabilitas harga dalam negeri.

Berdasarkan Permendag Nomor 1 Tahun 2018, impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh BULOG, impor beras dapat dilakukan oleh pihak swasta jika dipergunakan untuk keperluan bahan baku industri. Pemberlakuan kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk melindungi petani lokal.

Kemudian, kebijakan lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka stabilisasi harga beras adalah melalui kebijakan operasi pasar atau sekarang dikenal dengan istilah Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Pada awalnya kebijakan operasi pasar terdiri dari Operasi Pasar Murni (OPM) dan Operasi Pasar Khusus (OPK). OPM digunakan saat harga beras terlalu tinggi akibat adanya kelebihan permintaan di pasar. Sedangkan OPK bertujuan untuk menyalurkan bantuan pangan pada masyarakat miskin yang rawan pangan setelah terjadinya krisis tahun 1998. Dalam perkembangannya pada tahun 2002 OPK diubah namanya menjadi Raskin (beras untuk keluarga miskin), lalu tahun 2015 Program Raskin berubah menjadi Program Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) dan mulai tahun 2017 Program Rastra ditransformasikan menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pada 3 Mei 2017 pemerintah membuat instrumen kebijakan baru yang disebut instrumen kebijakan hukum. Instrumen ini diberi nama Satgas Pangan. Beberapa tugas Satgas Pangan yaitu stabilisasi harga pangan, memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, mengawasi rantai pasok, memastikan konsumen mendapatkan harga yang adil, dan melakukan penegakan hukum dibidang pangan. Satgas pangan terdiri dari unsur Polri,

Kementrian Dalam Negeri, Perum Bulog, Kementrian Perdagangan, Kementrian Pertanian, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>13</sup>

### 3. Kebijakan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah harus merumuskan kebijakan pangan nasional yang dapat meningkatkan ketahanan pangan. Kebijakan pangan tersebut meliputi ketersediaan pasokan pangan dalam kuantitas dan kualitas yang baik serta keterjangkauan harga pangan oleh masyarakat dan aman untuk dikonsumsi.

Kebijakan ketahanan pangan Indonesia semenjak orde baru tidak banyak berubah hingga saat ini yaitu dengan pendekatan penyediaan pangan (Food Availability Approach) atau lebih dikenal dengan swasembada/kemandirian pangan dengan produksi domestik untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Namun demikian, strategi paradigma FAA atau Swasembada/Kemandirian Pangan yang dilakukan pemerintah selama ini memiliki kelemahan. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, Indonesia memiliki tiga permasalahan umum yaitu permasalahan penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Terkait dengan impor pangan, pada era globalisasi dan pasar bebas saat ini, hampir tidak ada negara yang menutup diri dari perdagangan global dan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan negaranya secara domestik. Pemerintah Indonesia tidak perlu

---

<sup>13</sup> Desi Aryani, *Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan*, Jurnal Pangan, Vol. 30, No.2, Tahun 2021, h. 76-81 (Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023 Pukul 11.30 WIB)

alergi atau anti kepada impor pangan asalkan tidak berlebihan dan tetap bertumpu pada produksi domestik, impor pangan harus dianggap sebagai langkah pendamping produksi pangan domestik.

Paradigma dan strategi ketahanan pangan nasional melalui paradigma FAA atau swasembada/kemandirian pangan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak efektif dan efisien. Pemerintah harus mulai melihat bahwa ketahanan pangan akan terwujud apabila tiga dimensi utama dari ketahanan pangan yaitu: (i) ketersediaan (availability); (ii) akses (accessability); dan (iii) keterjangkauan (affordability) oleh seseorang (keluarga) dapat terpenuhi. Pemerintah juga harus mampu mengintegrasikan kebijakan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan dengan kebijakan pembangunan nasional lainnya semacam kebijakan ekonomi makro melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.<sup>14</sup>

#### **4. Kebijakan Harga**

Secara umum kebijakan harga diberlakukan untuk mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang secara tidak langsung membatasi aktivis yang memiliki kekuatan dominan untuk mengendalikan pasar dan keberpihakan pasar. Harga dasar beras berlaku sebagai pelindung untuk produsen maupun petani di tengah kemerosotan harga beras akibat banyaknya kuantitas produk beras di pasar. Menurut Nurrochmat (2016), fluktuasi harga

---

<sup>14</sup> Andi Rachman Salasa, *Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 13, No.1, Tahun 2021, h. 46 (Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2023 Pukul 10.45 WIB)

hanya terjadi pada negara dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil seperti Indonesia.

Ketidakstabilan pasokan beras dan kenaikan harga merupakan salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus tepatnya dari pemerintah Indonesia demi menjaga pasokan beras dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Saat ini penyebab terjadinya ketidakstabilan pasokan dan kenaikan harga beras adalah tingginya disparitas harga beras internasional dibandingkan dengan harga beras dalam negeri. Tak hanya itu, peningkatan harga beras juga ditentukan oleh banyaknya penawaran dan permintaan pasar, seperti terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah penawaran dengan jumlah permintaan yang membuat produsen sulit mencukupi kebutuhan konsumen. Namun dengan kebutuhan konsumen yang terus meningkat dapat menyebabkan harga yang melambung tinggi.

Tujuan kebijakan harga dilakukan diantaranya adalah melindungi produsen dari kemerosotan harga pasar yang biasanya terjadi pada musim panen, melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli khususnya pada musim paceklik, dan mengendalikan inflasi melalui stabilitas harga. Kebijakan harga memiliki dua sisi yang menunjang bidang produksi dan sisi lain yang menyangkut bidang distribusi dan konsumsi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Amang, B. *Kebijakan Pangan Nasional*, (Jakarta: Dhama Karsa, 1995), h. 25.

## 2.2 Penelitian yang Relevan

1. Yulianthi, dkk, (2021), jurnal, Universitas Bosowa, judul jurnal “*Analisis Formulasi Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Pangkep*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras di Kabupaten Pangkep, hal ini dapat dilihat adanya koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkep dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi serta adanya pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkep terhadap produsen di Pasar Sentral Pangkep dalam menjaga harga beras supaya warga masih mampu menjangkau harga beras. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membuat formulasi kebijakan stabilitas harga di Kabupaten Pangkep bahwa dari faktor penghambat pihak pemerintah masih berusaha agar gapoptan memiliki mesin penggiling yang menghasilkan beras premium untuk mengurangi dan membatasi pembeli gabah dari luar Kabupaten Pangkep faktor cuaca dan pupuk, karena cuaca sangat berpengaruh dalam mengeringkan gabah dan saat menggiling gabah. Sedangkan faktor pendukung dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp. 8.300,00 yaitu operasional terhadap harga beras dan gabah meningkat maka pihak Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan selalu melakukan pasar murah agar

harga beras dan gabah turun dengan cara mensterilkan harga beras dan gabah di Kabupaten Pangkep.<sup>16</sup>

2. Muh. Nasrul Haq, (2021), skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, judul skripsi “*Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga di Kabupaten Sinjai*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan kenaikan harga beras adalah kualitas dan kuantitas beras dipengaruhi oleh cuaca serta jenis dan cara penggunaan pupuk, kenaikan harga pokok pembelian pemerintah (HPP), spekulasi kenaikan harga, kenaikan biaya produksi beras. Langkah untuk mengatasinya Bulog mengadakan operasi pasar untuk menambah suplai beras dipasaran. Operasi pasar merupakan langkah yang efektif dalam pengendalian harga beras, kendalanya kekurangtertiban dalam melakukan pembayaran.<sup>17</sup>
3. Dwi Tirta Ayu Rahmawaty, (2020), skripsi, UIN Alaudin Makassar, judul skripsi “*Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perum Bulog Subdivre Makassar menjalankan fungsinya untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilisasi harga pasar dengan melakukan penyimpanan beras selama jangka waktu tertentu, yaitu berkisar antara tiga sampai enam bulan. Penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog berbeda dengan *Ihtikar* karena praktik

---

<sup>16</sup> Yulianthi, dkk, *Analisis Formulasi Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Pangkep*, Jurnal Paradigma Administrasi Negara, Vol. 4, No.1, Tahun 2021 (Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2023 Pukul 11.45 WIB)

<sup>17</sup> Muh. Nasrul Haq, *Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Sinjai*, Skripsi, Tahun 2021, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar (Diakses Pada Tanggal 1 April 2023 Pukul 10.00 WIB)

penyimpanan yang dilakukan tidak menimbulkan kemudharatan melainkan *Mashlahah* bagi banyak orang yaitu dengan menstabilkan harga pasar, stok beras yang dibutuhkan tercukupi, serta menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat.<sup>18</sup>

Adapun perbedaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas berfokus pada kinerja dan kebijakan Perum Bulog dalam melakukan pengendalian harga beras mulai dari pengadaan beras sampai kepada penyimpanan beras dalam gudang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana Perum Bulog menjalankan peranannya secara maksimal sehingga tercapainya kestabilan harga beras.

---

<sup>18</sup> Dwi Tirta Ayu Rahmawaty, *Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Tahun 2020, Makassar: UIN Alauddin Makassar (Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 10:45 WIB)



### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran alur pemikiran penelitian yang disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir penelitian ini. Kerangka berpikir ini juga menjelaskan mengenai keterkaitan antara variabel yang diteliti.



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**

*Sumber: Data diolah Pada Tahun 2023*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu rangkaian kegiatan mulai dari mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, serta menarik kesimpulan secara akurat dan sistematis yang berkenaan dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu sebagai responsif peneliti terhadap objek yang diteliti sekaligus merupakan sebab akibat dari fenomena yang terjadi, sehingga perlu adanya pemusatan pikiran agar bisa menyebutkan berbagai keadaan yang terjadi.

**Tabel 3.1.**  
**Peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras**

<b>No.</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber</b>
1	Peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras	a. Menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) b. Melakukan operasi pasar c. Mengimpor beras d. Satgas pangan	Puska PDN BP2KP Kemendag (2015) dan Aryani, dkk (2017)

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti. Lokasi penelitian yang dituju oleh peneliti adalah Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian adalah karena Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh mempunyai peranan penting dalam mengendalikan harga dan mengelola persediaan bahan pangan khususnya beras di Aceh, sehingga adanya kemudahan dan ketersediaan data Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh yang mendukung kelancaran penelitian.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*. Teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>19</sup>

Data penelitian berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15.

## 1. Sumber Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>20</sup> Adapun data primer yang digunakan disini berupa dari hasil wawancara dengan beberapa informan antara lain Manajer Pengadaan Bulog, Asisten Manajer Pelayanan Publik, Staf Manajemen Logistik, Ketua Gapoktan, dan Pengusaha Kilang Padi.

## 2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, berita-berita internet dan arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 157.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Manajemen Sumber...*, h. 187.

### 3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian di dalam penelitian kualitatif yakni berkaitan langsung dengan langkah ataupun cara yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh secara tepat dan akurat.<sup>22</sup>

**Tabel 3.2.**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Manajer Pengadaan Bulog	1 orang	Pihak yang berwenang dalam pengadaan dan menjaga harga pangan
2	Asisten Manajer Pelayanan Publik	1 orang	Pihak yang berwenang dalam melakukan operasi pasar
3	Staf Manajemen Logistik	1 orang	Pihak yang berwenang dalam mengatur stok pangan
4	Ketua Gapoktan	2 orang	Pihak yang berdampak dalam ketidakstabilan harga beras
5	Pengusaha Kilang Padi	2 orang	Pihak yang bekerja sama dengan Perum

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 107.

		Bulog dalam menjaga stok beras
<b>Jumlah</b>		7 orang

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain:

#### 1. Metode observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>23</sup>

Dalam hal ini penulis mengadakan peninjauan langsung kelapangan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan Peran Perum Bulog Divisi Regional Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras.

#### 2. Metode wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 310.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari semua rumusan masalah yang dilakukan dengan tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Metode dokumentasi

Metode ini diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.<sup>25</sup>

### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data perlu dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah serta untuk menguji data yang telah diperoleh sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Kredibilitas

Merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang akan disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan. Salah satunya yang akan dilakukan oleh peneliti untuk

---

<sup>25</sup> Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), h. 42-43.

menemukan data yang valid, maka peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan untuk meningkatkan kepercayaan data, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, dan triangulasi atau sebagai pengecekan data dari metode, sumber, dan waktu.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode triangulasi antara lain:

- a. Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data yang akan dilakukan dengan cara melalui pendekatan kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda.
- b. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang akan dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- c. Triangulasi waktu yaitu data yang akan dikumpulkan dari informan pada waktu yang tepat serta kesiapan untuk dilakukan teknik wawancara, sehingga data yang akan diperoleh lebih valid dengan menggunakan teori/bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang akan ditemukan oleh peneliti.

## 2. Transferabilitas

Pada penelitian kualitatif uji transferabilitas akan melakukan keabsahan data yang dapat diterapkan di perusahaan lainnya. Sehingga penelitian yang akan diajukan dapat digunakan dalam konteks yang berbeda, namun masih dapat dipertanggungjawabkan.



### 3. Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini dependabilitas dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

### 4. Konfirmabilitas

Pada penelitian kualitatif uji confirmability yang akan dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang data yang sudah diperoleh dari informan agar memenuhi standar uji konfirmabilitas, sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.

## 3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan proses pemiliha, pemfokusan, pemisahan, serta mentransformasikan data yang didapatkan di lokasi penelitian. Pada tahap ini data-data yang sudah terkumpul dilapangan akan diseleksi berdasarkan tingkat kepentingannya.

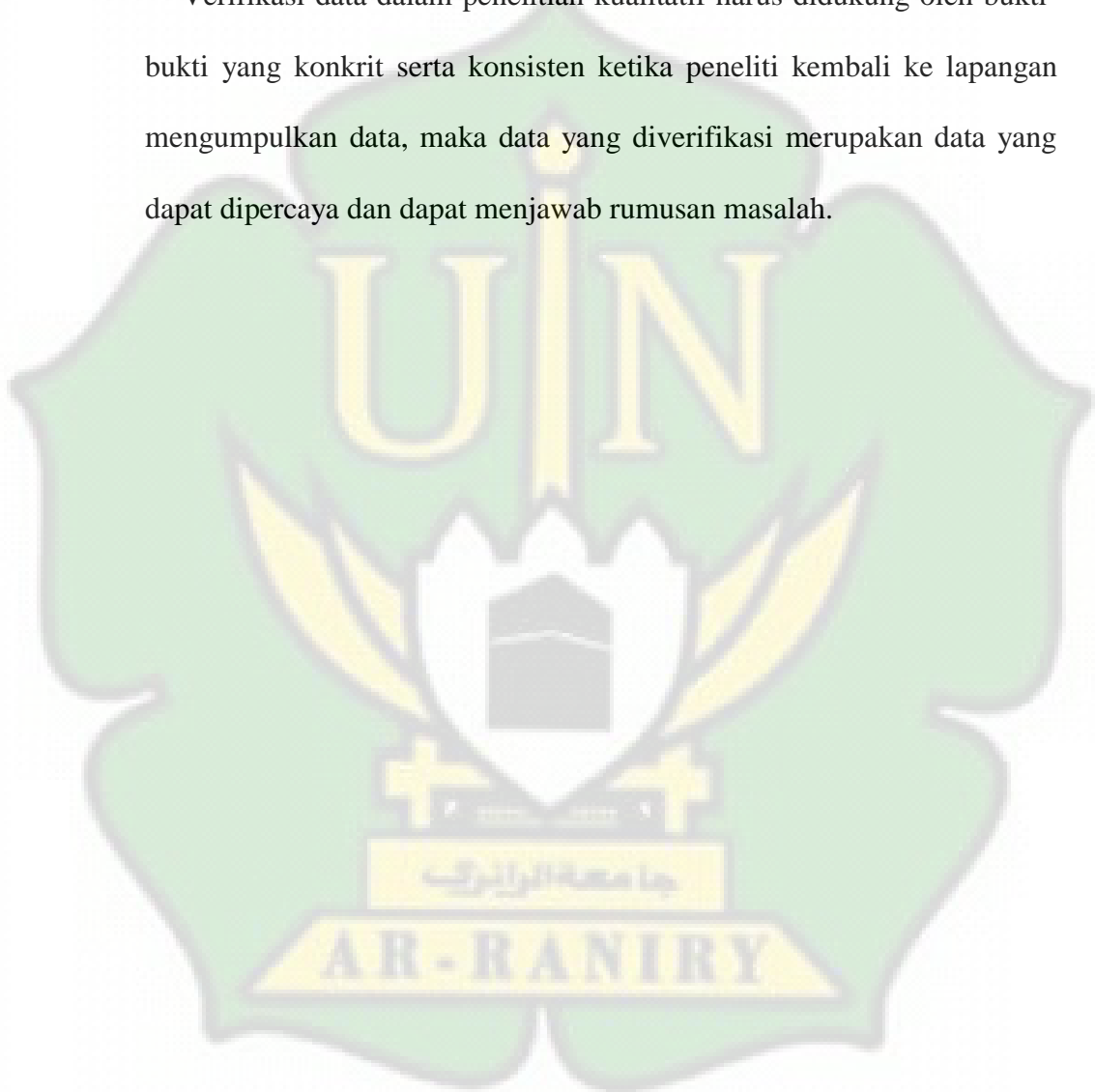
#### 2. Display Data

Setelah reduksi data, maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu mendisplay data. Display data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui display data akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan

kerja selanjutnya dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang konkrit serta konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka data yang diverifikasi merupakan data yang dapat dipercaya dan dapat menjawab rumusan masalah.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Perum Bulog**

Perjalanan Perum Bulog dimulai pada saat dibentuknya Bulog pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas Bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab Bulog mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala Bulog dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi Bulog yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran Bulog. Oleh karena itu, tanggung jawab Bulog lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok Bulog sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu,

kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas Bulog seperti Keppres No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalui Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani Bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat Bulog sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok Bulog adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang

selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok Bulog masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Pada tahun 2016, Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2016, pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perum Bulog untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa:

- a. Pengamanan harga pangan pokok beras di tingkat produsen dan konsumen
- b. Pengelolaan cadangan pangan pokok beras pemerintah
- c. Penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu
- d. Pelaksanaan impor beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian untuk mendukung penugasan Perum Bulog berdasarkan PP Nomor 16 tahun 2016, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 48 tahun 2016 pada tanggal 31 Mei 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Dalam Perpres itu

ditegaskan, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional pemerintah menugaskan kepada Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen.<sup>26</sup>

Dalam setiap daerah Perum Bulog Pusat mempunyai anak maupun cabang di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Aceh yang bernama Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh. Perum Bulog ini merupakan perpanjangan tangan dari Perum Bulog Pusat di Jakarta sebagai pengembalian tugas khusus di daerah Aceh. Yang mana tugasnya adalah menyelenggarakan pelayanan publik semaksimal mungkin mulai dari tahap pengadaan sampai ke tahap penyaluran kembali khususnya di bidang perberasan.

Tidak hanya itu, Kantor Wilayah Aceh juga terdiri dari enam Subdivre, satu seksi logistik dan 15 komplek pergudangan. Enam subdivre yaitu Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Kutacane, Meulaboh, dan Blang Pidie serta seksi logistik di Takengon. Di Banda Aceh memiliki 2 gudang, Sigli memiliki 2 gudang, Lhokseumawe 1 gudang, Langsa memiliki 1 gudang, Meulaboh memiliki 2 gudang, Blang Pidie memiliki 3 gudang, Kutacane memiliki 3 gudang, dan Takengon memiliki 1 gudang.

Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh mempunyai struktur organisasi yang berbentuk campuran, fungsional, staf, dan lini yang mana setiap personil mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kualifikasinya.

---

<sup>26</sup> <https://www.bulog.co.id/>, Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2023.


#### 4.1.2. Lokasi Penelitian

Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh bertempat di Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415.

#### 4.1.3. Makna Logo Perusahaan

**Tabel 4.1.**  
**Makna Logo Perusahaan Bulog**

		
	Logogram – Matahari	Gambar matahari dengan gradasi warna kuning kemerah-merahan, dipilih untuk menampilkan Perum Bulog sebagai sumber kehidupan bagi segala etnis dan latar belakang budaya. Matahari juga merefleksikan semangat perubahan dalam perusahaan untuk lebih profesional, transparan, dan sehat dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
	Logotype- Jenis Huruf Logo	Jenis Huruf logo Bulog yang berwarna biru menjadi refleksi konkrit akan besarnya peranan

		<p>Perum Bulog dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sedangkan bentuk huruf yang kokoh menggambarkan bentuk fisik Perum Bulog sebagai perusahaan yang solid dalam mengemban visi dan misinya.</p>
	<p>Slogan - Tagline</p>	<p>Mempunyai makna bahwa terselenggaranya hak atas pangan, dalam tingkat kecukupan dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai kebutuhan masyarakat, dan perwujudan peran strategis serta keberhasilan perusahaan dalam kebijakan pangan pemerintah.</p>

*Sumber: Perum Bulog Pusat, 2023*

#### 4.1.4. Visi, Misi, Tata Nilai dan Budaya Perusahaan

##### Visi :

“Menjadi Perusahaan Pangan yang Unggul dan Terpercaya dalam Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan.”

##### Misi :

1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat.



2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegritas.
3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.

**Tata Nilai dan Budaya Perusahaan :**

Ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-301/DS200/09/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Perum Bulog.

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : membangun kerja sama dan sinergitas<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <https://www.bulog.co.id/>, Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2023.

#### **4.1.5. Kepemilikan dan Saham**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog pasal 1 menyebutkan bahwa Perum Bulog adalah Badan Usaha Miliki Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.<sup>28</sup>

#### **4.1.6. Perencanaan dan Pengembangan Usaha**

Selain menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang tertuang dalam kegiatan Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO), Perum Bulog juga melaksanakan usaha-usaha lain berupa kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Usaha (PPU). Berdasarkan cakupan kegiatannya Perencanaan dan Pengembangan Usaha dibagi menjadi 3, yaitu : Industri, Perdagangan, dan Jasa.

##### **1. Perdagangan**

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan berbagai komoditi pangan, yang tidak semuanya dapat dipenuhi dari produk-produk dalam negeri. Disisi lain, potensi sumberdaya komoditi yang dihasilkan oleh daerah, maupun kebutuhan daerah akan komoditi yang harus dipasok dari luar merupakan peluang

---

<sup>28</sup> <https://www.bulog.co.id/>, Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2023.

usaha perdagangan yang dapat dikembangkan pada tingkat Divisi Regional (Divre) maupun Subd Divisi Regional (Subdivre). Tidak dapat dipungkiri, bahwa perdagangan komoditi merupakan aktifitas bisnis dengan daya tarik pasar yang tinggi. Hal ini tergambar dalam banyaknya jumlah pemain dalam bisnis ini. Dengan memiliki jaringan Divre/Subdivre yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadikan Perum Bulog unggul dalam memperoleh informasi tentang harga dan kebutuhan pangan yang akan diperdagangkan di suatu wilayah.

## 2. Industri

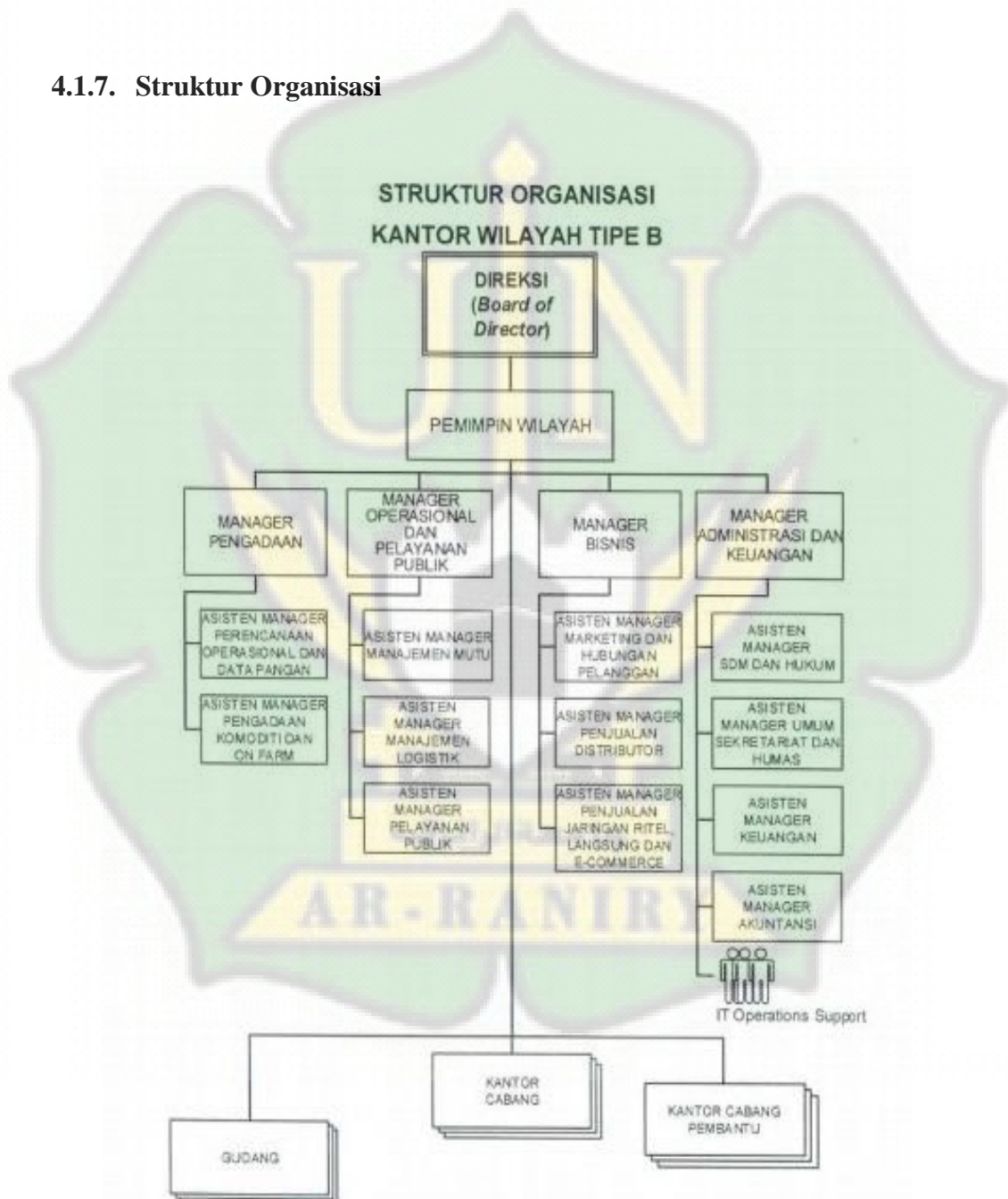
Kegiatan industri dibagi dalam 3 kategori, yaitu : industri berbasis beras, industri pendukung, dan industri pangan lain. Industri berbasis beras, adalah industri yang merupakan integrasi proses manufaktur perberasan, sebagaimana yang terangkai dalam Rice Processing Complex (RPC). Industri pendukung, adalah industri yang menghasilkan produk-produk pendukung diluar proses manufaktur perberasan (karung, packaging, dan lain-lain). Industri pangan lain, adalah industri pangan yang menghasilkan produk turunan dari beras (down-stream product), maupun industri pangan primer dan sekunder lainnya (gula, berbasis jagung, dan lain-lain).

## 3. Jasa

Beberapa jenis usaha jasa yang dikelola pada Direktorat Perencanaan & Pengembangan Usaha Perum Bulog adalah jasa pemberdayaan/penyewaan asset yang dimiliki ( seperti gudang, kantor,

tanah kosong dan asset lainnya), jasa angkutan melalui anak perusahaan (PT. Jasa Prima Logistik) dan jasa survey, perawatan kualitas dan dan pemberantasan hama.

#### 4.1.7. Struktur Organisasi



**Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perum Bulog Kanwil Aceh**

*Sumber: Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh, 2021*

#### 4.1.8. Daftar Karyawan

**Tabel 4.2.**  
**Daftar Nama Karyawan**  
**Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Irsan Nasution	Pemimpin Wilayah Aceh
2	Nazalia Flora	Manager Administrasi & Keuangan Kanwil Aceh
3	Komerza	Manager Pengadaan Kanwil Aceh
4	Monang Simbolon	Manager Bisnis Kanwil Aceh
5	Hafizhsyah	Manager OPP Kanwil Aceh
6	Muhammad Sabri	Asman Umum, Sekretariat dan Humas Kanwil Aceh
7	Azhari	Asman SDM & Hukum Kanwil Aceh
8	Dedi Iskandar Lubis	Asman Keuangan Kanwil Aceh
9	Zul Fadli	Asman Marketing & Hub Pelanggan Kanwil Aceh
10	M. Luthfi Parinduri	Asman Akuntansi Kanwil Aceh
11	Taufiq	Asman Penjualan Jaringan Ritel, Langsung & E-Commerce Kanwil Aceh
12	Nanda Vanessa	Asman Penjualan Distributor Kanwil Aceh
13	Ahmad Fadly	Asman Pelayanan Publik Kanwil Aceh
14	Didik Gunawan	Asman Pengadaan Komoditi & On Farm Kanwil Aceh
15	Achmad Fauzi	Asman Perencanaan Operasional Dan Data Pangan Kanwil Aceh
16	Resi Usfandy	Asman Manajemen Mutu Kanwil Aceh
17	Faizah	Asman Manajemen Logistik Kanwil Aceh
18	Erlita Nova Feryna	Area Manager Ub-Jastasma Kanwil Aceh
19	Ferry Zamirza	Asisten Auditor Kanwil Aceh
20	Zakiyuddin	Junior Sales Assistant Kanwil Aceh

21	Teguh Dwi Syahputra	It Operation Support Kanwil Aceh
22	Randhy Rahmadhani	Pjs Asman Muda Ub-Opaset Kanwil Aceh
23	Liza Diesty W	Kasir Kanwil Aceh
24	Firmansyah Putra	Petugas Perawatan Kualitas Kanwil Aceh
25	Ainal Mardhiah	Staf Ub Jastasma Kanwil Aceh
26	Fauzi	Staf Minku Kanwil Aceh
27	Indah Fuji Lestari	Staf Minku Kanwil Aceh
28	Nisrina Arifah	Staf Minku Kanwil Aceh
29	Gita Mulky Novisra	Staf Minku Kanwil Aceh
30	Nora Maghfirah	Staf Minku Kanwil Aceh
31	Sayed Habibullah	Staf Minku Kanwil Aceh
32	Chairul Ikhsan	Staf Opp Kanwil Aceh
33	Hablina Meutia	Staf Opp Kanwil Aceh
34	Mahlizar	Staf Pengadaan Kanwil Aceh
35	Novia Fajarina	Staf Bisnis Kanwil Aceh
36	Mariatul Kibtiah	Staf Bisnis Kanwil Aceh
37	Mahlil	Kagud Siron Kanwil Aceh
38	Teuku Abdul Halim	Jurtim Gudang Siron Kanwil Aceh
39	M. Hasyimi Fardiansyah	Kerani Gudang Siron Kanwil Aceh
40	Teuku Anwar Efendi	Petugas Adm Gudang Siron Kanwil Aceh

*Sumber: Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh, 2023*

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1 Peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras

Perum Bulog merupakan perusahaan BUMN dan telah ditunjuk oleh pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan juga ikut berperan penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Terdapat tiga pilar dalam ketahanan pangan yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), dan stabilitas (*stability*). Perlu diketahui bahwa stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan harga suatu barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Begitu halnya dalam menjaga stabilisasi harga beras, dimana harga dasar beras berlaku sebagai pelindung (*protect*) bagi produsen maupun petani ditengah merosotnya harga beras akibat banyaknya kuantitas produk beras di pasar. Maka dari itu, Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh sangat berpengaruh dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Terdapat beberapa instrumen kebijakan dalam menjaga stabilitas harga beras di Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh antara lain operasi pasar, harga pembelian pemerintah (HPP), impor beras, dan satgas pangan.

#### 1. Operasi Pasar

Pasar murah merupakan salah satu program stabilisasi harga beras yang dibentuk pemerintah pada tahun 2017 dengan menunjuk Perum Bulog sebagai penyelenggara kebijakan tersebut. Pasar murah merupakan bagian dari program

operasi pasar. Perbedaannya dengan operasi pasar yaitu pasar murah dilakukan dengan menjual bahan pangan pokok khususnya beras secara langsung kepada konsumen dengan harga di bawah harga pasar atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), sedangkan operasi pasar merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan menambah supply beras di pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Pengadaan Perum Bulog terkait stabilisasi harga beras dengan program operasi pasar bahwa:

“Dalam menjaga stabilitas harga beras Perum Bulog hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan tersebut bukan sebagai pihak yang membuat kebijakan, terlebih saat ini telah dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) sehingga mereka mempunyai wewenang lebih dalam pembuatan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras, seperti operasi pasar maupun SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Saat melaksanakan operasi pasar murah itu tidak terbatas hanya pada beras saja tapi juga ada bahan pokok lain seperti gula, minyak, tepung, telur, termasuk cabai dan bawang. Dalam melaksanakan kebijakan itu Bulog juga bekerja sama dengan Dinas Pangan Provinsi Aceh & Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)”.<sup>29</sup>

Dan juga hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan Publik, bahwa:

“Untuk hal ini kami mempunyai program pasar murah atau SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke ritel maupun distributor dengan harga Rp.8.600/kg dengan ketentuan bahwa penjualan kepada konsumen maupun masyarakat itu tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi). Pelaksanaan pasar murah biasanya dilakukan pada waktu tertentu seperti menjelang Puasa Ramadhan, menjelang lebaran, dan sebagainya.”<sup>30</sup>

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Manajemen Logistik, yang mengatakan bahwa:

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Komerza Sebagai Manajer Pengadaan Bulog Pada Tanggal 7 Juni 2023.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Publik Pada Tanggal 8 Juni 2023.



“Terkait dengan operasi pasar atau yang sering kita dengar pasar murah biasanya dilakukan untuk pengendalian harga beras dimana harga beras terlalu mahal sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.”<sup>31</sup>

**Tabel 4.3.**  
**Daftar Harga Bahan Pokok Operasi Pasar Murah Juni 2023**

No.	Bahan Pokok	Harga
1	Beras 5 Kg	Rp.40.000/Sak
2	Gula 2 Kg	Rp.20.000
3	Minyak Goreng 2 Liter	Rp.30.000
4	Telur Ayam Ras	Rp.46.000/Papan
5	Cabe Merah ½ Kg	Rp.8.000
6	Bawang Merah ½ Kg	Rp.13.000

Tabel di atas merupakan daftar harga bahan pokok saat diadakannya pasar murah di bulan juni 2023, hal ini dilakukan untuk menekan laju Inflasi dan stabilisasi harga pangan oleh pemerintah yang terdiri dari beras 1.650 Kg, Gula 660 Kg, Minyak Goreng 660 Liter, Telur Ayam Ras sebanyak 313 papan, dan cabai merah sebanyak 75 Kg.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras itu hanya sebagai operator atau pelaksana kebijakannya sedangkan yang berfungsi sebagai regulator atau pembuat kebijakannya adalah Badan Pangan Nasional. Operasi pasar merupakan salah satu program atau kebijakan yang dilakukan oleh Perum Bulog Kanwil Aceh dalam rangka stabilisasi harga pangan. Tujuan utama dari pasar

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faiza Sebagai Staf Manajemen Logistik Pada Tanggal 12 Juni 2023.

murah adalah untuk mengurangi permintaan beras di pasar sehingga diharapkan harga pasar dapat turun karena berkurangnya permintaan beras sekaligus dapat mengendalikan harga beras secara menyeluruh. Dalam melakukan operasi pasar biasanya Bulog bekerjasama Dinas Pangan Provinsi Aceh dan Disperindag dan juga saat melakukan operasi pasar biasanya Bulog membuat kesepakatan terhadap distributor agar menjual kepada masyarakat itu dengan harga yang tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi). Pelaksanaan pasar murah biasanya dilakukan pada waktu tertentu seperti menjelang Puasa Ramadhan, menjelang lebaran, dan sebagainya.

## 2. HPP (Harga Pembelian Pemerintah)

Esensi dari penerapan HPP yaitu untuk memberikan insentif bagi petani dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan, terutama pada saat panen raya. Melalui kebijakan ini pemerintah mengharapkan kestabilan harga, produksi petani dalam negeri melimpah, pendapat petani meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Pengadaan Perum Bulog terkait penerapan HPP bahwa:

“Untuk kebijakan penetapan HPP beras berdasarkan kadar air dan butir beras patah sedangkan gabah berdasarkan kadar air dan hampa. Di tahun 2023 ini, harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani ditetapkan sebesar Rp.5000 dan GKP di tingkat penggilingan Rp.5.100. Sementara itu, untuk gabah kering giling (GKG) di penggilingan ditetapkan dengan harga Rp.6.200 dan GKG di Perum Bulog Rp.6.300. Sehingga dengan adanya ketetapan harga diatas pemerintah sangat berharap agar semuanya mendapat manfaat dari HPP diatas.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Komerza Sebagai Manajer Pengadaan Bulog Pada Tanggal 7 Juni 2023.

Dan juga hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan Publik, bahwa:

“Dalam hal ini Perum Bulog Kanwil Aceh juga ada bekerja sama dengan beberapa Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Bulog memberikan jaminan terhadap gabah yang mereka tanam bahwa apabila terjadi kemerosotan harga maka Bulog siap untuk membeli gabah tersebut sesuai dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dengan kualitas yang telah ditentukan juga. Adapun standar beras di Perum Bulog dengan ketentuan derajat sosoh 95%, kadar air 14%, butir patah 20%, butir menir 2% dengan harga Rp.9.950.”<sup>33</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Staf Manajemen Logistik yang mengatakan bahwa:

“Penetapan HPP bukan hanya untuk melindungi harga gabah/beras ditingkat petani tetapi juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi petani agar minat masyarakat terhadap petani tidak menurun. Saat ini, pemerintah juga terus melakukan penyesuaian harga agar lebih baik dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan harga beras yang efektif dan efisien. Sehingga pemerintah bisa menyerap gabah atau beras dari petani secara maksimal untuk memperbanyak stok beras demi tercapai ketahanan pangan nasional.”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa penerapan HPP bertujuan untuk memberikan insentif bagi petani dengan cara memberikan jaminan harga terutama saat panen raya berlangsung. Saat ini pemerintah juga terus melakukan penyesuaian harga agar lebih baik, sehingga pemerintah bisa menyerap gabah atau beras dari petani secara maksimal untuk memperbanyak stok beras demi tercapai ketahanan pangan nasional. Kebijakan penetapan HPP beras berdasarkan kadar air dan butir beras patah sedangkan gabah berdasarkan kadar air dan hampa. Di tahun 2023 ini, harga gabah kering

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Publik Pada Tanggal 8 Juni 2023.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faiza Sebagai Staf Manajemen Logistik Pada Tanggal 12 Juni 2023.

panen (GKP) ditingkat petani ditetapkan sebesar Rp.5000 dan GKP di tingkat penggilingan Rp.5.100. Sementara itu, untuk gabah kering giling (GKG) di penggilingan ditetapkan dengan harga Rp.6.200 dan GKG di Perum Bulog Rp.6.300. Sehingga dengan adanya ketetapan harga diatas pemerintah sangat berharap agar semuanya mendapat manfaat dari kebijakan ini. Adapun standar beras di Perum Bulog dengan ketentuan derajat sosoh 95%, kadar air 14%, butir patah 20%, butir menir 2% dengan harga Rp.9.950.

### 3. Impor beras

Impor beras merupakan kegiatan memasukkan beras dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan impor beras ini digunakan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sewaktu-waktu diperlukan oleh pemerintah untuk penanggulangan bencana, stabilisasi harga, kelangkaan beras, membantu masyarakat menengah ke bawah, dan untuk hal-hal yang telah diwaspadai oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Pengadaan Bulog terkait impor beras bahwa:

“Terkait impor beras bisa disebut dengan pengadaan beras dari luar negeri. Beras impor selanjutnya akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) baik oleh Dinas Pangan Maupun Dinas Sosial. Beras impor yang telah sampai ke Indonesia akan melalui proses *checker* baik dari pihak kapal yang membawa beras maupun pihak gudang Bulog. Proses pengecekan dimulai dari karung beras, timbangan beras, serta mutu beras tersebut. Beras-beras yang telah melalui pengecekan dan sesuai dengan standar gudang Bulog akan dimasukkan ke dalam gudang dan yang tidak memenuhi kriteria akan dibawa ke ruang yang berbeda. Tidak hanya itu, beras tersebut juga disimpan menggunakan suhu yang telah ditetapkan sehingga kualitas beras dapat terjamin.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Komerza Sebagai Manajer Pengadaan Bulog Pada Tanggal 7 Juni 2023.

Dan juga hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan Publik,

bahwa:

“Dalam hal mengimpor beras biasanya dana berasal dari Bulog terlebih dahulu yang menggunakan skema komersil yang berarti pinjaman bank. Setelah adanya pengadaan beras dari luar negeri maka beras tersebut akan dijual oleh Bulog kepada pemerintah. Nah, uang hasil dari penjualan tersebut yang digunakan Bulog untuk melunasi pinjaman bank tadi. Selain itu, perlu diketahui bahwa tidak ada persaingan harga antara beras lokal dengan beras impor. Bulog mengimpor beras hanya untuk mengintervensi harga beras di pasar. Oleh karena itu, saat Bulog telah melakukan impor beras maka Bulog juga telah menetapkan harga jual sebesar 8.600/Kg dan untuk pedagang maupun pengecer itu tidak boleh melebihi HET yang telah ditetapkan sebesar Rp.9.950/Kg. Sedangkan beras lokal itu tidak mempunyai permasalahan khusus terlebih beras lokal mempunyai kualitas premium dan sudah mempunyai brand tersendiri.”<sup>36</sup>

Selanjutnya, Staf Manajemen Logistik juga mengatakan hal yang sama

bahwa:

“Impor beras dilakukan untuk memenuhi stok beras dalam negeri sehingga tidak terjadi kelangkaan beras. Beras yang masuk ke dalam negeri semuanya harus melalui proses pengecekan sehingga kualitasnya sudah terjamin. Impor beras juga merupakan salah satu komponen kebijakan di dalam pengendalian harga beras khususnya dari suplay/pasokan, sehingga program pengendalian harga seperti SPHP dapat tetap berjalan. Karena statusnya adalah komponen kebijakan pengendalian harga, maka pelaksanaan impor beras akan dilakukan sesuai dengan prosedur pemerintah pula dan sifatnya tidak menentu.”<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa impor beras merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah baik oleh Dinas Pangan maupun Dinas Sosial untuk memenuhi stok beras dalam negeri untuk menghindari terjadinya kelangkaan beras. Beras-beras impor akan

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Publik Pada Tanggal 8 Juni 2023.

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faiza Sebagai Staf Manajemen Logistik Pada Tanggal 12 Juni 2023.

melalui proses *checker* baik dari pihak kapal yang membawa beras maupun pihak gudang Bulog. Proses pengecekan dimulai dari karung beras, timbangan beras, serta mutu beras. Selanjutnya, beras yang telah memenuhi standar akan dimasukkan ke dalam ruang khusus dengan suhu yang telah ditentukan, sedangkan beras yang tidak memenuhi standar akan dilakukan penanganan kembali. Adapun proses pengimporan beras itu dilakukan dengan menggunakan skema komersil atau yang disebut dengan pinjaman bank. Kemudian, Bulog menjual beras kepada pemerintah yang mana uang hasil penjualan beras impor akan dialokasi untuk pelunasan pinjaman bank.

#### 4. Satgas Pangan

Satgas pangan merupakan satuan tugas yang bergerak dibidang pangan untuk mengawasi kestabilan harga pangan, ketersediaan stok pangan, mengawasi rantai stok pangan, memastikan konsumen mendapatkan harga yang adil dan menghindari praktik kecurangan serta melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Pengadaan Perum Bulog terkait pembentukan satgas pangan mengatakan bahwa:

“Satgas pangan sendiri merupakan kepanjangan dari satuan tugas pangan yang dibentuk untuk mengendalikan dan menjaga kestabilan stok pangan masyarakat. Satgas pangan ini biasanya berasal dari Polri serta pemerintah kabupaten/kota.”<sup>38</sup>

Dan juga hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan Publik, bahwa:

“Satgas pangan merupakan instrumen kebijakan hukum yang tidak hanya berfungsi untuk stabilisasi pangan saja tetapi juga ikut memastikan

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Komerza Sebagai Manajer Pengadaan Bulog Pada Tanggal 7 Juni 2023.

stok beras, mengawasi rantai pasok serta penegakan hukum dibidang pangan. Satgas pangan biasanya berasal dari Kepolisian RI, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan”<sup>39</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Staf Manajemen Logistik bahwa:

“Perlu kita ketahui bahwa Satgas Pangan itu merupakan Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengendalikan dan menjaga kestabilan stok pangan masyarakat, berbeda halnya dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional) yaitu lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pelaksanaan urusan pangan. Satgas pangan biasanya berasal dari Polri, Perum Bulog, serta kementerian pertanian.”<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa Satgas pangan merupakan Satuan Tugas Pangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjaga kestabilan stok pangan masyarakat, mengawasi rantai pasok, memastikan konsumen mendapatkan harga yang adil dan terjangkau dari kecurangan pedagang serta penegakan hukum dibidang pangan. Satgas pangan terdiri dari unsur Polri, Perum Bulog, Kementerian pertanian, serta Kementerian Perdagangan.

Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras di Perum Bulog Divre Aceh, Manajer Pengadaan Bulog mengatakan bahwa:

“Aceh secara Nasional merupakan daerah produksi beras namun karena tingginya jumlah permintaan beras dari provinsi sebelah yaitu Sumatra Utara yang notabeneanya mengambil beras dari Aceh, meskipun begitu Alhamdulillah harga beras di Aceh masih terkendali di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET)”<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Publik Pada Tanggal 8 Juni 2023.

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faiza Sebagai Staf Manajemen Logistik Pada Tanggal 12 Juni 2023.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Komerza Sebagai Manajer Pengadaan Bulog Pada Tanggal 7 Juni 2023.

Dan juga hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan Publik, mengatakan bahwa:

“Kenaikan harga beras biasanya disebabkan karena sedang mengalami musim paceklik dimana padi-padi masih dalam proses penanaman sehingga pasokan beras yang tersedia itu tidak banyak dan terjadilah kelangkaan beras yang menyebabkan harga melambung tinggi. Selain itu, kenaikan harga BBM bahkan situasi politik atau situasi dunia itu ikut berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok seperti saat terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina”.<sup>42</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Staf Manajemen Logistik bahwa:

“Biasanya kenaikan harga beras terjadi karena sedang tidak dalam musim panen dan beras yang beredar pun minim. Maka pada saat itulah terjadi kenaikan harga akibat terjadinya kelangkaan beras”.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menemukan bahwa secara umum penyebab kenaikan harga beras itu dikarenakan sedang mengalami musim paceklik atau tidak dalam musim panen yang menyebabkan kelangkaan beras sehingga harga beras melambung tinggi serta tingginya jumlah permintaan beras di luar provinsi Aceh, yang mana Aceh merupakan daerah produksi beras. Bahkan kenaikan harga BBM serta situasi politik atau situasi dunia yang sedang tidak baik ikut menaikkan harga kebutuhan pokok.

Terkait dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga beras, Manajer Pengadaan Bulog mengatakan bahwa:

“Kenaikan harga beras sangat berdampak besar terhadap masyarakat dimana masyarakat yang berpendapatan rendah akan lebih bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Lain halnya dengan keluarga berpendapatan sedang mereka hanya akan mengurangi jumlah

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Publik Pada Tanggal 8 Juni 2023.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faiza Sebagai Staf Manajemen Logistik Pada Tanggal 12 Juni 2023.



permintaan komoditas beras tanpa harus menggantinya dengan makanan pokok lainnya”.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan Publik, yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini tentunya petani lebih terjamin kesejahteraannya namun disisi lain kesejahteraan masyarakat itu menjadi rendah, karena jika sebelumnya masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangganya hingga adanya kenaikan ini membuat masyarakat membatasi dirinya dalam memenuhi bahan pokok. Bahkan kenaikan harga ini bisa berdampak sangat buruk karena rendahnya gizi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya khususnya bagi golongan masyarakat ke bawah”.<sup>45</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Staf Manajemen Logistik, bahwa:

“Dampaknya bisa dilihat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang lain, sehingga masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah susah untuk mengonsumsi beras”.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat mengetahui bahwa terdapat dampak positif maupun negatif saat terjadi kenaikan harga beras. Yang mana dampak positif tersebut dirasakan oleh petani karena memperoleh keuntungan yang cukup besar sehingga kesejahteraannya lebih terjamin. Sedangkan dampak negatif itu dirasakan oleh masyarakat karena mereka akan lebih bergantung kepada beras dan mengurangi jumlah permintaan komoditi beras akibat kenaikan harga beras, bahkan masyarakat bisa terkena gizi buruk akibat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya khususnya masyarakat golongan ke bawah. Maka dari itu Perum Bulog Kanwil Aceh sangat berperan

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Komerza Sebagai Manajer Pengadaan Bulog Pada Tanggal 7 Juni 2023.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Publik Pada Tanggal 8 Juni 2023.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faiza Sebagai Staf Manajemen Logistik Pada Tanggal 12 Juni 2023.

penting dalam menjaga stabilitas harga beras demi tercapainya kesejahteraan setiap lapisan masyarakat.

Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Perum Bulog Kanwil Aceh terhadap kilang padi saat terjadi ketidakstabilan harga beras, Pengusaha Kilang Padi PT Saleh Family Ampeawe, mengatakan bahwa:

“Bulog akan melakukan pengadaan jika harga beras bernilai rendah di pasaran dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah (HPP) dan untuk sekarang Harga Pembelian Pemerintah yaitu Rp.9.950/kg. Berbeda halnya dengan beras komersil yang harganya berkisar antara Rp.11.500-Rp.12.000/Kg, yang mana beras komersil ini biasanya diproduksi dengan menggunakan kemasan kilang padi dan kualitas beras yang premium serta beras komersil ini biasanya di minta oleh Bulog bagian Komersil untuk suatu keperluan”.<sup>47</sup>

Selanjutnya, Pengusaha Kilang Padi MZ Indrapuri, mengatakan bahwa:

“Saat terjadinya ketidakstabilan harga beras tepatnya yang terjadi di Kilang Padi ini, Perum Bulog tidak melakukan hal-hal secara khusus terhadap kilang padi ini, mereka tetap hanya akan melakukan transaksi beli beras berdasarkan kebutuhan saja baik itu ketika harga sedang melambung tinggi maupun harga beras sedang murah”.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa saat terjadinya ketidakstabilan harga beras maka bulog akan melakukan pengadaan dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah dan sekarang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah Rp.9.950/Kg. Lain halnya dengan beras komersil yang harganya berkisar antara Rp.11.500-Rp.12.000/Kg, dimana beras komersil biasanya diproduksi dengan menggunakan kemasan kilang padi dan

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jahlul Sebagai Pengusaha Kilang Padi PT Saleh Family Ampeawe Pada Tanggal 14 Juni 2023.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahlian Sebagai Pengelola Kilang Padi MZ Pada Tanggal 15 Juni 2023.

kualitas beras yang premium serta pemasokan beras ini dilakukan oleh Bulog bagian komersil bukan bagian pengadaannya.

Terkait dengan perihal yang belum terealisasi dengan efektif di Perum Bulog Kanwil Aceh Manajer Pengadaan Bulog mengatakan bahwa:

“Sejauh ini prosedur kerja Perum Bulog Kanwil Aceh sudah efektif, terlebih Perum Bulog sudah menjadi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan juga saat ini Bulog telah bergerak di bidang bisnis dan tidak hanya terfokus pada raskin saja akan tetapi Perum Bulog Kanwil Aceh telah mempunyai produk-produk tersendiri khususnya beras dengan kualitas yang sudah baik.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan Publik, yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kinerja Perum Bulog Kanwil Aceh sudah terlaksana dengan baik, mungkin sebelum ini ada yaitu Bulog diuntut untuk membeli padi petani sebanyak-banyaknya dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) cuman dalam penyalurannya saja yang sudah tidak ada lagi, seperti pemberian raskin yang telah dihentikan sehingga banyak beras yang menetap di gudang. Namun, sekarang permasalahan itu sudah ada solusinya dimana saat ini ada yang namanya bantuan pangan dari pemerintah sehingga memungkinkan terjadi proses beras masuk dan beras keluar dari Perum Bulog Kanwil Aceh.”<sup>50</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Staf Manajemen Logistik, bahwa:

“Untuk sekarang ini Perum Bulog Kanwil Aceh telah menjalankan amanahnya dengan baik, hal ini bisa dilihat dengan adanya pengadaan beras dalam waktu berkala baik pengadaan dalam negeri maupun luar negeri (impor) sehingga bisa menjamin kesejahteraan baik petani ataupun masyarakat”.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengusaha Kilang Padi PT Saleh Family Ampeawe, yang mengatakan bahwa:

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Komerza Sebagai Manajer Pengadaan Bulog Pada Tanggal 7 Juni 2023.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Publik Pada Tanggal 8 Juni 2023.

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faiza Sebagai Staf Manajemen Logistik Pada Tanggal 12 Juni 2023.

“Untuk saat ini Perum Bulog Kanwil Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik, seperti halnya ketika harga beras menurun Bulog ikut turun tangan dengan membeli beras dari para petani tapi tidak semua beras di setiap daerah bisa ditampung oleh Bulog hal ini dikarenakan Bulog mempunyai standar harga tersendiri dan juga setiap daerah memiliki harga yang berbeda baik itu mahal ataupun murah. Ada beberapa daerah di Aceh yang mempunyai harga sesuai kriteria Perum Bulog seperti Sigli, Lhokseumawe, dan Meulaboh.”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengusaha Kilang Padi MZ Indrapuri, yang mengatakan bahwa:

“Tentunya Perum Bulog Kanwil Aceh telah melakukan yang terbaik untuk menjaga kestabilan harga beras seperti dengan melakukan pasar murah dimana Perum Bulog ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun petani sehingga kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik”.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Gapoktan Cahaya Baru 41, yang mengatakan bahwa:

“Sudah sangat efektif dikarenakan program yang dilaksanakan oleh Perum Bulog Kanwil Aceh sudah sangat membantu masyarakat maupun petani seperti halnya adanya pasar murah membantu masyarakat Aceh yang kurang mampu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sedangkan bagi petani sendiri mereka tidak merasa dirugikan saat terjadinya kemerosotan harga beras karena pemerintah membeli beras dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Gapoktan Kejar Harapan 44, yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sudah efektif apalagi sekarang ada yang namanya pasar murah sehingga bisa mencukup kebutuhan pangan masyarakat tidak hanya beras saja tetapi gula, telur, tepung, dan sebagainya. Maka

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jahlul Sebagai Pengusaha Kilang Padi PT Saleh Family Ampeawe Pada Tanggal 14 Juni 2023.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahlian Sebagai Pengelola Kilang Padi MZ Pada Tanggal 15 Juni 2023

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indrawati Sebagai Ketua Gapoktan Cahaya Baru 41 Pada Tanggal 13 Juni 2023.

dari itu diharapkan Perum Bulog Kanwil Aceh dapat menyelenggarakan program-program yang lain yang bisa membantu masyarakat Aceh.”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Perum Bulog Kanwil Aceh telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terlebih sekarang Bulog telah menjadi suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak hanya terfokus pada pengadaan beras saja tetapi juga telah bergerak di bidang bisnis dan mempunyai produk tersendiri dengan kualitas yang sangat baik. Selain itu, permasalahan yang dialami Perum Bulog Kanwil Aceh juga sudah mulai terpecahkan seperti pemberhentian Raskin yang menyebabkan beras-beras yang sudah diserap dari petani penyalurannya pun ikut terhenti sehingga tidak ada beras masuk maupun keluar tetapi sekarang telah ada bantuan pangan dari pemerintah dan beras-beras pun dapat terpakai dengan semestinya.

Ditinjau dari sisi lain, bahwa Perum Bulog Kanwil Aceh juga ikut membantu para petani dengan memasok beras disaat harga beras sedang menurun berdasarkan kriteria harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau yang disebut HPP (Harga Pembelian Pemerintah) sehingga petani tidak dirugikan. Meskipun begitu, tidak semua daerah mempunyai harga beras yang sesuai dengan standar Bulog sehingga hanya ada beberapa daerah tertentu saja seperti Sigli, Meulaboh, serta Lhokseumawe. Adapun program-program yang telah diselenggarakan oleh Bulog juga sangat berefek positif terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh seperti adanya pasar murah.

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bakti Sebagai Ketua Gapoktan Kejar Harapan 44 Pada Tanggal 13 Juni 2023.

#### 4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras

Faktor pendukung adalah segala hal yang bersifat untuk mendorong, memajukan, bahkan mengembangkan suatu kegiatan maupun usaha. Sedangkan faktor penghambat adalah segala hal yang bersifat menghambat maupun menghalangi terlaksananya suatu kegiatan dengan baik. Begitu juga dalam menjaga stabilitas harga beras tentunya Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh menemukan faktor-faktor pendukung maupun penghambat terlaksananya kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Pengadaan Bulog terkait faktor pendukung dalam menjaga stabilitas harga beras, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk faktor pendukungnya Alhamdulillah saat ini kita telah dibentuk Badan Pangan Nasional tepatnya pada tanggal 29 Juli 2021 yang mana badan ini sangat membantu dalam proses stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya beras. Badan Pangan Nasional juga ikut menggandeng BUMN Pangan terutama Bulog dan IDFOOD.”<sup>56</sup>

Tidak hanya itu, Asisten Manajer Pelayanan Publik juga mengatakan bahwa:

“Untuk faktor pendukung dalam menjaga stabilitas harga beras dengan melihat harga beras di pasar saat itu, jika harga beras mahal maka Bulog akan memasok beras lebih banyak agar membantu masyarakat. Selain itu, Bulog juga melakukan pemerataan atau ketersediaan stok beras”.<sup>57</sup>

Selanjutnya, Staf Manajemen Logistik juga menambahkan bahwa:

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Komerza Sebagai Manajer Pengadaan Bulog Pada Tanggal 7 Juni 2023.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Publik Pada Tanggal 8 Juni 2023.

“Pastinya disini ada penyerapan beras dari kilang padi dimana kilang padi sendiri mengambil gabahnya juga dari para petani sehingga kestabilan harga terjamin itu ditinjau dari sisi petaninya karena dalam pemerintahan untuk harganya telah ditentukan sehingga tidak ada harga dibawah rata-rata. Sedangkan untuk stabilisasi harga di masyarakat itu dengan adanya SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).”<sup>58</sup>

Adapun faktor penghambat dalam melakukan stabilisasi harga beras,

Manajer Pengadaan Bulog mengatakan bahwa:

“Tentunya ada hambatan tetapi karena adanya dukungan dari pemerintah maka permasalahan tersebut bisa dikendalikan. Dan semua hal itu tergantung dari kebijakan pemerintah sendiri”.<sup>59</sup>

Selanjutnya Asisten Manajer Pelayanan Publik juga mengatakan bahwa:

“Selama ini yang menjadi hambatan itu adanya permainan orang pasar yang mana beras yang telah dilontarkan sebenarnya untuk penetrasi harga pasar khususnya di Aceh tapi para pedagang pasar menjualnya lagi ke luar Aceh karena harga jualnya yang lebih tinggi, padahal dalam program SPHP sendiri telah ditetapkan bahwa tidak boleh menjual harga melebihi harga itu. Selain itu, faktor bencana alam seperti gagal panen, banjir, dan lain sebagainya juga itu menghambat stabilisasi harga. Namun begitu, untuk hal bencana alam biasanya Bulog mempunyai kapasitas penyalurannya masing-masing, seperti untuk tingkat kabupaten/kota itu Bulog memiliki cadangan beras 100 ton/tahun sedangkan tingkat provinsi itu 200 ton/tahun. Maka dari itu pemerintah baik Bupati maupun Walikota bisa meminta stok cadangan beras kepada Bulog jika dalam setahun itu terjadi bencana alam.”<sup>60</sup>

Tidak hanya itu, Staf Manajemen Logistik juga mengatakan bahwa:

“Untuk di Aceh biasanya yang menjadi hambatan yaitu laju inflasi dimana harga yang telah ditetapkan pemerintah untuk penyerapan beras itu tidak cocok, seperti dulu penetapan harga dari pemerintah itu Rp.8.600/kg dan untuk sekarang kita tidak menemukan lagi produksi beras dengan harga demikian. Selain itu, laju permintaan beras ke luar Aceh yang lebih banyak dengan tawaran harga yang lebih mahal sehingga Bulog kekurangan stok cadangan beras dalam daerah padahal

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faiza Sebagai Staf Manajemen Logistik Pada Tanggal 12 Juni 2023.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Komerza Sebagai Manajer Pengadaan Bulog Pada Tanggal 7 Juni 2023.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Publik Pada Tanggal 8 Juni 2023.

jika stok cadangan beras terisi penuh dalam gudang maka stabilisasi harga akan lebih mudah dicapai”.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam menjaga stabilitas harga beras adalah saat ini telah dibentuk suatu Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang membantu dalam proses stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya beras, Bapanas juga bekerja sama dengan BUMN khususnya Bulog dan IDFOOD. Selain itu, dengan melihat harga beras di pasar, melakukan pemerataan stok cadangan beras, melakukan operasi SPHP (Stabilitas Pangan dan Harga Pangan), dan melakukan penyerapan beras di kilang-kilang padi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mana gabahnya juga berasal dari petani sehingga bisa menciptakan kestabilan harga beras.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya permainan pedagang beras di pasar dimana beras-beras yang telah didistribusikan oleh pemerintah untuk menetralkan harga beras di pasar di jual kembali ke luar Aceh karena harga jual yang lebih tinggi padahal dalam program SPHP sendiri telah ditetapkan bahwa tidak boleh menjual harga melebihi harga pemerintah. Dan laju inflasi yang tinggi sehingga harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penyerapan beras tidak cocok. Tidak hanya itu, faktor penghambat juga berasal dari bencana alam seperti gagal panen, banjir, dan sebagainya. Meskipun demikian, jika terjadi bencana alam Bulog telah mengalokasikan stok cadangan

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faiza Sebagai Staf Manajemen Logistik Pada Tanggal 12 Juni 2023.



beras sebesar 100 ton pertahun untuk setiap kabupaten/kota dan 200 ton pertahun untuk setiap provinsi.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Peran Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras**

Dalam menjalankan peran menjaga stabilitas harga beras Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh hanya berfungsi sebagai operator atau pelaksana kebijakannya sedangkan yang berfungsi sebagai regulator atau pembuat kebijakannya adalah Badan Pangan Nasional. Terdapat beberapa instrumen kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilitas harga beras antara lain:

##### **1. Operasi Pasar**

Operasi pasar merupakan salah satu program atau kebijakan yang dilakukan oleh Perum Bulog Kanwil Aceh dalam rangka stabilisasi harga pangan baik beras, telur, tepung, gula, minyak, dan sebagainya. pasar murah merupakan bagian dari operasi pasar Perbedaannya dengan operasi pasar yaitu pasar murah dilakukan dengan menjual bahan pangan pokok khususnya beras secara langsung kepada konsumen dengan harga di bawah harga pasar atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), sedangkan operasi pasar merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan menambah supply beras di pasar. Adapun tujuan utama dari pasar murah adalah untuk mengurangi permintaan beras di pasar sehingga diharapkan harga pasar dapat turun karena berkurangnya permintaan beras sekaligus

dapat mengendalikan harga beras secara menyeluruh. Dalam melakukan operasi pasar biasanya Bulog bekerjasama Dinas Pangan Provinsi Aceh dan Disperindag. Pelaksanaan pasar murah biasanya dilakukan pada waktu tertentu seperti menjelang Puasa Ramadhan, menjelang lebaran, dan sebagainya.

## 2. Penerapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)

Esensi penerapan HPP yaitu untuk memberikan insentif bagi petani dengan cara memberikan jaminan harga terutama saat panen raya berlangsung. Tidak hanya itu, melalui kebijakan ini pemerintah mengharapkan kestabilan harga, produksi petani dalam negeri melimpah, pendapat petani meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah juga terus saja melakukan penyesuaian harga agar lebih baik, sehingga pemerintah bisa menyerap gabah atau beras dari petani secara maksimal untuk memperbanyak stok beras demi tercapai ketahanan pangan nasional. Kebijakan penetapan HPP beras berdasarkan kadar air dan butir beras patah sedangkan gabah berdasarkan kadar air dan hampa. Di tahun 2023 ini, harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani ditetapkan sebesar Rp.5000, GKP di tingkat penggilingan Rp.5.100, gabah kering giling (GKG) di penggilingan dengan harga Rp.6.200 dan GKG di Perum Bulog Rp.6.300. Sedangkan standar beras di Perum Bulog dengan ketentuan derajat sosoh 95%, kadar air 14%, butir patah 20%, butir menir 2% dengan harga Rp.9.950.

## 3. Impor Beras

Impor beras merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah baik oleh Dinas Pangan maupun Dinas Sosial sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sewaktu-waktu diperlukan oleh pemerintah untuk penanggulangan bencana, stabilisasi harga, kelangkaan beras, membantu masyarakat menengah ke bawah, dan untuk hal-hal yang telah diwaspadai oleh pemerintah. Beras impor akan melalui proses *checker* baik dari pihak kapal yang mengangkut beras maupun pihak gudang Bulog. Proses pengecekan dimulai dari karung beras, timbangan beras, serta mutu beras. Selanjutnya, beras yang telah memenuhi standar akan dimasukkan ke dalam ruang khusus dengan suhu yang telah ditentukan, sedangkan beras yang tidak memenuhi standar akan dilakukan perbaikan kembali. Adapun proses pengimporan beras itu dilakukan dengan menggunakan skema komersil atau yang disebut dengan pinjaman bank. Kemudian, Bulog menjual beras kepada pemerintah yang mana uang hasil penjualan beras impor akan dialokasi untuk pelunasan pinjaman bank.

#### 4. Satgas Pangan

Satgas pangan merupakan Satuan Tugas Pangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjaga kestabilan stok pangan masyarakat, mengawasi rantai pasok, memastikan konsumen mendapatkan harga yang adil dan terjauh dari kecurangan pedagang serta penegakan hukum dibidang pangan. Satgas pangan terdiri dari unsur Polri, Perum Bulog, Kementrian pertanian, serta Kementrian Perdagangan. Berbeda halnya dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional) yaitu lembaga

pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pelaksanaan urusan pangan.

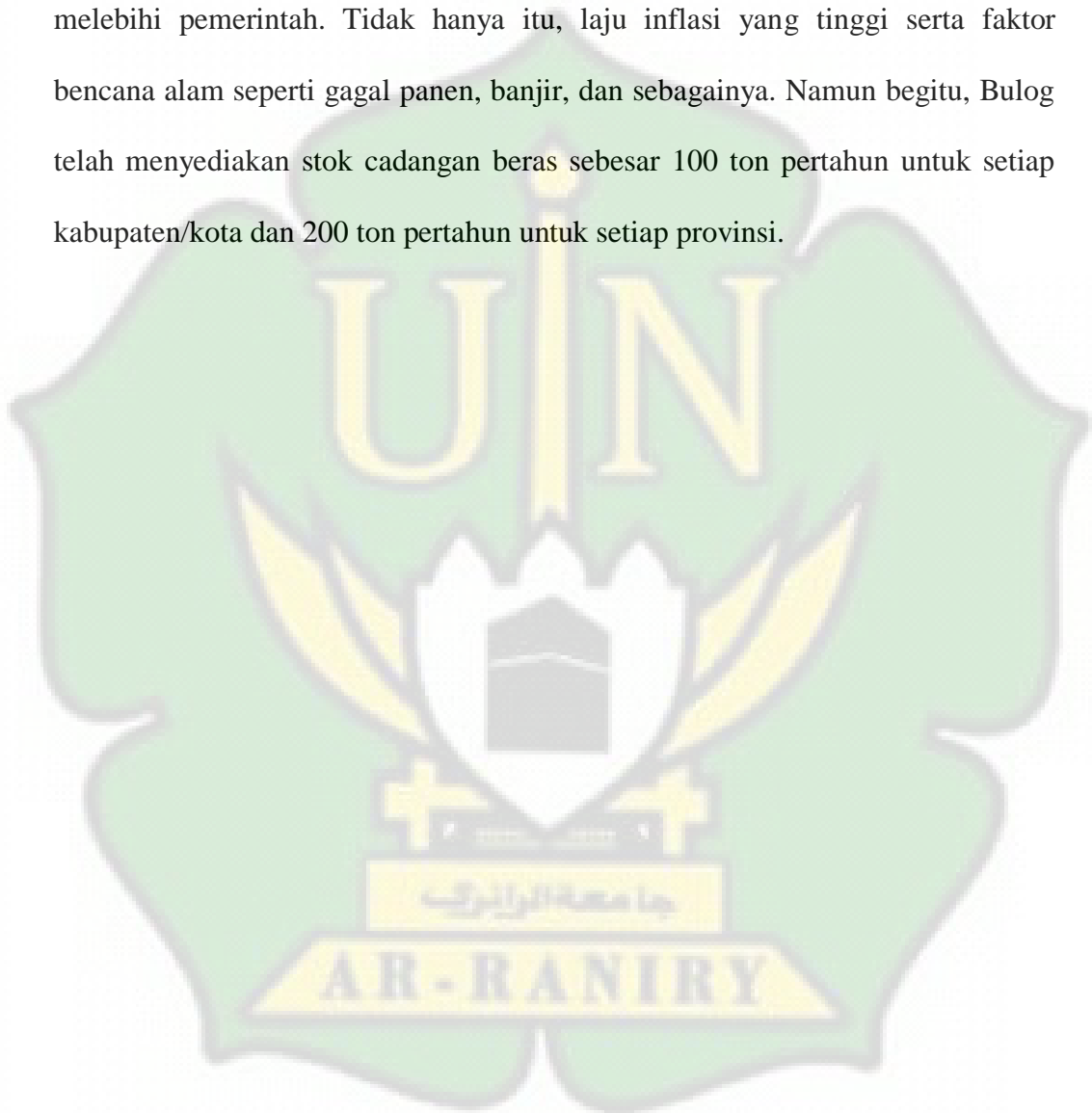
Ketidakstabilan harga beras tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sedang mengalami musim paceklik, kelangkaan beras, tingginya jumlah permintaan beras di luar Provinsi Aceh, kenaikan harga BBM, dan situasi politik maupun situasi dunia yang sedang tidak baik. Selain itu, terdapat dampak positif dan negatif saat ketidakstabilan harga beras, dimana dampak positif tersebut dirasakan oleh petani karena memperoleh keuntungan yang cukup besar sedangkan dampak negatifnya dirasakan oleh masyarakat masyarakat menengah ke bawah karena kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

#### **4.3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras**

Adapun faktor pendukung adalah segala sesuatu yang menunjang tercapainya stabilitas harga beras khususnya di Aceh, yaitu dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang sangat berperan penting dalam proses stabilisasi harga beras, melakukan pemerataan stok cadangan beras, melihat harga beras di pasaran, melakukan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), dan melakukan penyerapan beras di kilanh-kilang padi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana gabahnya berasal dari petani sehingga mampu menciptakan kestabilan harga beras.

Sedangkan faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menghambat untuk terwujudnya stabilisasi harga beras, antara lain adanya permainan

pedagang pasar dimana beras yang di distribusikan oleh pemerintah sebagai penetrasinya harga di jual kembali ke luar daerah dengan harga yang lebih tinggi padahal dalam program SPHP telah ditetapkan agar tidak menjual harga melebihi pemerintah. Tidak hanya itu, laju inflasi yang tinggi serta faktor bencana alam seperti gagal panen, banjir, dan sebagainya. Namun begitu, Bulog telah menyediakan stok cadangan beras sebesar 100 ton pertahun untuk setiap kabupaten/kota dan 200 ton pertahun untuk setiap provinsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dengan menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh dalam menjaga stabilitas harga beras itu hanya sebagai operator atau pelaksana kebijakannya sedangkan yang berfungsi sebagai regulator atau pembuat kebijakannya adalah Badan Pangan Nasional. Adapun instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras antara lain: Operasi pasar dengan adanya pasar murah, Penerapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah), adanya impor beras, dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pangan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Ketidakstabilan harga beras tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sedang mengalami musim paceklik, kelangkaan beras, tingginya jumlah permintaan beras di luar Provinsi Aceh, kenaikan harga BBM, dan situasi politik maupun situasi dunia yang sedang tidak baik.
2. Adapun faktor pendukung dalam menjaga stabilitas harga beras adalah telah dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bertujuan membantu dalam proses stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya beras. Tidak hanya itu, dengan melihat harga beras di pasar, melakukan pemerataan stok

cadangan beras, melakukan operasi SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), dan melakukan penyerapan beras di kilang-kilang padi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya permainan pedagang beras di pasar dimana beras yang telah didistribusikan oleh pemerintah untuk penetrasi harga dijual kembali ke luar Aceh karena harga jual yang lebih tinggi. Selain itu, laju inflasi yang tinggi, faktor bencana alam seperti gagal panen, banjir. Meskipun demikian, jika terjadi bencana alam Bulog telah mengalokasikan stok cadangan beras sebesar 100 ton pertahun untuk setiap kabupaten/kota dan 200 ton pertahun untuk setiap provinsi.

## **5.2. Saran**

1. Kepada Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh untuk terus memaksimalkan program ataupun kebijakan dalam menstabilkan harga pangan khususnya beras demi tercapainya ketahanan pangan nasional.
2. Kepada kilang padi diharapkan agar terus menggiling padi dengan menyerap gabah-gabah dari petani dalam negeri.
3. Kepada Gapoktan agar terus menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait teknik menanam padi, pemberian pupuk yang tepat, pemilihan bibit yang unggul, serta cara membasmi hama maupun penyakit agar dapat meningkatkan produksi beras dalam negeri.

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti hal yang sama dengan perspektif yang berbeda sehingga akan melahirkan ide atau inovasi baru.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amang, B. (1995). *Kebijakan Pangan Nasional*. Jakarta: Dhama Karsa.
- Amrullah, Sabaruddin. (2013). *Kebijakan Ekonomi Beras Indonesia*. Jakarta: Puslit-bang Bulog.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Faesar, Sanafiah. (2002). *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Haq, Muh. Nasrul. (2021). *Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Horoepoetri, dkk. (2003). *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Komarudin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Octania, Galuh. (2021). *Peran Pemerintah Rantai Pasok Beras Indonesia*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.
- Sarjono, Soekanto. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Walgito, Bimo. (2003). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.

### Jurnal:

- Aryani, Desi. (2021). *Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan*. Jurnal Pangan. Vol. 30. No.2.

- Rahmawaty, Dwi Tirta Ayu. (2020). *Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Salasa, Andi Rachman. (2021). *Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 13. No.1.
- Septiadi, Dudi, dkk. (2019). *Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol. 13. No.2.
- Tangkudung, Anggun Juwita. (2016). *Analisis Penerapan dan Manajemen Strategi Distribusi Beras di Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo)*. Jurnal Ilmiah Agribisnis. Vol. 1. No.1.
- Yulianthi, dkk. (2021). *Analisis Formulasi Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Pangkep*. Jurnal Paradigma Administrasi Negara. Vol. 4. No.1.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

**Artikel/Website Resmi Pemerintah:**

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/redam-kenaikan-harga-beras-bulog-aceh-lepas-1533-ton-beras-operasi-pasar>

<https://dialeksis.com/aceh/stok-mencapai-20000-ton-bulog-aceh-jamin-persediaan-beras-aman-hingga-lebaran/>

<https://hargapangan.id/tabel-harga/pasar-tradisional/komoditas>

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 606/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munagasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan.</li> <li>b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.</li> </ul>												
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;</li> <li>7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;</li> <li>8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi &amp; Tata Kerja UIN Ar-Raniry;</li> <li>9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;</li> <li>10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;</li> <li>11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER/50/PI/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);</li> <li>12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.</li> </ul>												
Memperhatikan	Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal <b>02 Februari 2023</b>												
Menetapkan	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN</b></p> <p>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH</p>												
KESATU	<p>Menunjuk dan mengangkat Saudara</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Dr. Muji Mulla, M.Ag</td> <td style="width: 50%;">Sebagai pembimbing I</td> </tr> <tr> <td>2. Arif Akbar, MA</td> <td>Sebagai pembimbing II</td> </tr> </table> <p>Untuk membimbing skripsi</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nama</td> <td style="width: 50%;">Alia Nabilla</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>190802023</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>Ilmu Administrasi Negara</td> </tr> <tr> <td>Judul</td> <td>Peran Perum BULOG Divisi Regional Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras</td> </tr> </table>	1. Dr. Muji Mulla, M.Ag	Sebagai pembimbing I	2. Arif Akbar, MA	Sebagai pembimbing II	Nama	Alia Nabilla	NIM	190802023	Program Studi	Ilmu Administrasi Negara	Judul	Peran Perum BULOG Divisi Regional Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras
1. Dr. Muji Mulla, M.Ag	Sebagai pembimbing I												
2. Arif Akbar, MA	Sebagai pembimbing II												
Nama	Alia Nabilla												
NIM	190802023												
Program Studi	Ilmu Administrasi Negara												
Judul	Peran Perum BULOG Divisi Regional Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras												
KEDUA	Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.												
KETIGA	Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.												

Disiapkan di Banda Aceh  
 Pada tanggal 01 Maret 2023  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN,**



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

*Lampiran 2*

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1029/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 Perum Bulog Divisi Regional Aceh  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALIA NABILLA / 190802023**  
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Desa Dham Pulo, Kec Ingin jaya, Kab Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Perum Bulog Divisi Regional Aceh Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Mei 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,




*Berlaku sampai : 30 Oktober  
 2023*

Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري  
**AR-RANIRY**

## Lampiran 3


**BULOG**

 Perum BULOG  
 Kantor Wilayah Aceh  
 Jl. Teungku H.M. Daud Beureueh  
 Banda Aceh

Telp (0651) 23920  
 Faks. (0651) 32718


 dlive\_ned@bulog.co.id

Nomor : B- 11/01040/HM.03/06/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Persetujuan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Banda Aceh, 09 Juni 2023

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
 Jln. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam  
 Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor :  
 B-1029/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Penelitian Ilmiah  
 Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Perum BULOG Kanwil  
 Aceh menyetujui Izin Penelitian sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku di  
 lingkungan Perum BULOG. Izin Penelitian dengan judul "Peran Perum BULOG Kanwil  
 Aceh dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras", dengan nama mahasiswa sebagai  
 berikut :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN / PRODI
1.	Alia Nabilla	190802023	Ilmu Administrasi Negara

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG  
 Kantor Wilayah Aceh

  
 IRSAN NASUTION  
 Pemimpin

*Lampiran 4*

Yth. LIZA DIESTYA WARDHANI,

Berikut ini adalah informasi transaksi yang telah Anda lakukan di Bank BSI Cash Management:

Id Transaksi	:	FT23159K60Q4
Tanggal & Waktu	:	08/06/2023 17:35:22
Jenis Transaksi	:	Overbook
Rekening Asal	:	1058626577
Rekening Tujuan	:	7222721363
Jumlah	:	Rp. 287,500,000
Nama Penerima	:	ZHRUL FUDHNI
Berita	:	01001 122061A PEMB BERAS KOM PREM SEB 25000 KG KPD PT PANGAN MAKMUR SF
No. Referensi	:	
Status	:	SUCCESS

Mohon simpan email ini sebagai referensi dan bukti atas transaksi Anda.

Terima kasih telah menggunakan fasilitas Bank BSI Cash Management.

Hormat Kami,

Bank Syariah Indonesia

Email ini dihasilkan secara otomatis oleh komputer. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bank BSI Call di 1500789 atau email kami di [cms\\_support@bankbsi.co.id](mailto:cms_support@bankbsi.co.id)

AR-RANIRY

*Lampiran 5*



Wawancara dengan Bapak Komerza Sebagai Manajer Pengadaan Bulog



Wawancara dengan Ibu Faiza Sebagai Staf Manajemen Logistik



Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadli Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Publik



Wawancara dengan Bapak Mahlian di MZ Kilang Padi





Wawancara dengan Bapak Jahlul di PT.Pangan Makmur Saleh Family Blang Bintang



Observasi Stok Beras Permintaan Beras Premium yang Siap Dikirim ke Bulog



Wawancara dengan Bapak Bakti Sebagai Gapoktan Kejar Harapan 44



Wawancara dengan Ibu Indrawati Sebagai Gapoktan Cahaya Baru 41



Operasi Pasar Murah yang Dilakukan di Desa Wisata Lubok Sukon, Aceh Besar



Beras SPHP yang akan disalurkan ke pasar murah



Alat Untuk Mengukur Suhu Ruang dengan Berstandar ISO (International Organization for Standardization)



Stok Beras Impor dari Thailand